



LAPORAN KINERJA

2
0
2
3

PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA



spiritpusbanglin.kemdikbud.go.id



pusbanglin@kemdikbud.go.id



[pusbanglin_kemdikbud](https://www.instagram.com/pusbanglin_kemdikbud)



[Pusbanglin Bahasa Sastra](https://www.youtube.com/PusbanglinBahasaSastra)

BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR



KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, selain itu laporan ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin).

Pada tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan tiga sasaran kegiatan dan empat indikator kinerja kegiatan dan berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai keberhasilan pencapaian.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga mewujudkan kinerja *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2023.

Bogor, 26 Januari 2024

Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.

NIP 196605201991031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
GAMBARAN UMUM	1
DASAR HUKUM	3
TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	5
ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
VISI DAN MISI	8
MATRIX KINERJA JANGKA MENENGAH	9
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA	9
PERJANJIAN KINERJA	10
PROGRAM PRIORITAS	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
CAPAIAN KINERJA	13
SASARAN KEGIATAN I	14
INDIKATOR KEGIATAN I.I.1	5
SASARAN KEGIATAN II	47
INDIKATOR KEGIATAN II.I	48

SASARAN KEGIATAN III	59
INDIKATOR KEGIATAN III.I	60
INDIKATOR III.II	62

BAB IV. PENUTUP

83

SIMPULAN	80
FOKUS PERBAIKAN	81
LAMPIRAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1
Gambar 1.2 Gedung Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	2
Gambar 1.3 Foto seluruh pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3
Gambar 1.4 Rekap Data Pegawai	3
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6
Gambar 1.6 Program Prioritas Badan Bahasa	12
Gambar 2.1 Tampilan Baru KBBI VI Daring	19
Gambar 2.2 Statistik KBBI Daring	20
Gambar 2.3 Sampul Kamus Bidang Ilmu	22
Gambar 2.4 Sampul Kamus Erimologi	23
Gambar 2.5 Sampul Kamus Pemelajar	24
Gambar 2.6 Tampilan tatap muka Aplikasi Sipebi	25
Gambar 2.7 Logo Korpus Indonesia	26
Gambar 2.8 Laman Acuan Kemahiran Berbahasa	27
Gambar 2.9 Logo dan Tampilan Tatap Muka Aplikasi Padanan Istilah	28
Gambar 2.10 Sampul Pedoman Umum Pembentukan Istilah	29
Gambar 2.11 Keterkaitan Produk KBBI dengan Kegiatan dan Peroduk lain	30
Gambar 2.12 Keterkaitan Produk PASTI dengan Kegiatan dan Peroduk lain	31
Gambar 2.13 Giat Proses Produksi Film Kolaborasi dengan Satuan Pendidikan	32
Gambar 2.14 Film Animasi Disiarkan di Indonesiana TV	33
Gambar 2.15 Perwakilan Judul Film Animasi Hasil Pemodernan Sastra 2023	34
Gambar 2.16 Kegiatan Peluncuran sekaligus Uji Keberterimaan Publik Produk Pemodernan Sastra 2023	35
Gambar 2.17 Sampul Bahan Pengayaan Ensiklopedia Sastra Indonesia	36
Gambar 2.18 Tampilan Ensklopedi Sastra Indonesia	36
Gambar 2.19 Sampul Bahan Pengayaan Pengembangan Sastra	37
Gambar 2.20 Gambaran singkat Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra 2023	39
Gambar 2.21 Kegiatan Komunitas Sastra Penerima Bantuan Faisilitasi	42
Gambar 2.22 Kegiatan Konsinyasi Evaluasi dan Pelaporan Penerima Bantuan Pemereintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	43
Gambar 2.23 Sampul dan Tampilan Digitisasi Peta Bahasa Daerah	50
Gambar 2.24 Alur penginputan Latitude dan Longtitude	51
Gambar 2.25 Komponen Aplikasi VIBA	52
Gambar 2.26 Sampul Petunjuk Teknis Model Pengukuran Biaya Hidup Bahasa dan Tampilannya	52
Gambar 2.27 Fitur Utama Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan	53

Gambar 2.28 Alur pemutakhiran Aplikasi	54
Gambar 2.29 Sampul Petunjuk Teknis Model Registrasi Bahasa Daerah dan Tampilan Aplikasinya	55
Gambar 2.30 Faktor Pendukung Keberhasilan pembuatan Tiga model Pelindungan Bahasa	55
Gambar 2.31 Sampul Petunjuk Teknis Model Bimbingan Teknis Pengajar Utama	56
Gambar 2.32 Sampul Model Pelindungan Sastra	57
Gambar 2.33 Aksi Maestro Sastra Lisan Angklung Buncis sebagai Upaya Konservasi Sastra	57
Gambar 2.34 Perkembangan Nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	61
Gambar 2.35 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2023	65
Gambar 2.36 Kegiatan Kamus Masuk Sekolah	68
Gambar 2.37 Artikel Terkait Kata Tahun Ini 2023	69
Gambar 2.38 Tampilan fitur Revitalisasi	70
Gambar 2.39 Tampilan fitur konten Revitalisasi	70
Gambar 2.40 Data Revitalisasi Bahasa Daerah	71
Gambar 2.41 Tampilan Viba Monitoring Kuesioner	72
Gambar 2.42 Tampilan Viba Monitoring	74
Gambar 2.43 Tampilan Hasil Film Animasi	75
Gambar 2.44 Piagam Penghargaan ZI-WBK Internal	76
Gambar 2.45 Artikel Terkait Bantuan Pemerintah	77
Gambar 2.46 Kegiatan Pentas Karya Komunitas Sastra	78

DAFTAR TABEL

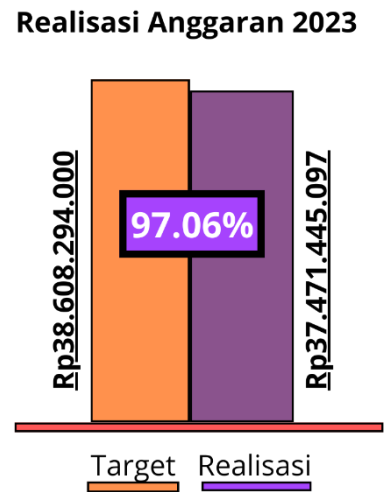
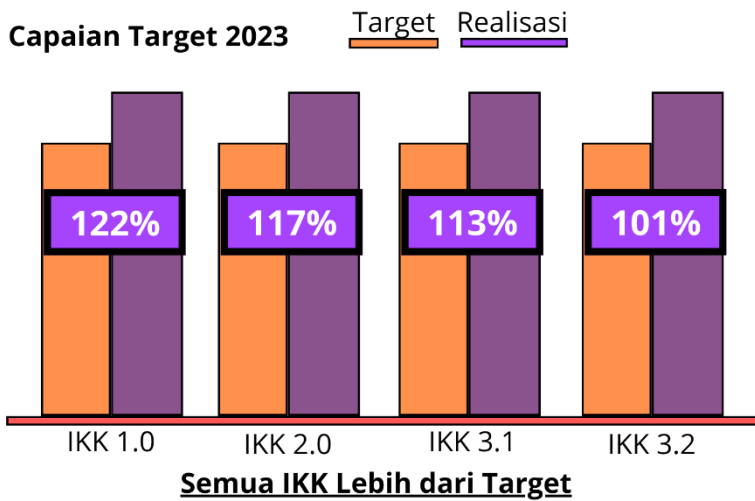
Tabel 1.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah	9
Tabel 1.2 Tujuan Strategis	9
Tabel 1.3 Perjanjian kinerja awal	10
Tabel 1.4 Perjanjian kinerja akhir	11
Tabel 1.5 Program Prioritas Nasional Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	12
Tabel 2.1 Capaian Kinerja	13
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IKK Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	15
Tabel 2.3 Judul 33 film animasi	16
Tabel 2.4 Hasil Inventarisasi Kosakata Balai/Kantor tahun 2023	21
Tabel 2.5 Daftar Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023	39
Tabel 2.6 Hambatan, Strategi Penyelesaian dan Langkah Antisipasi	44
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IKK Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra	48
Tabel 2.8 Hambatan, Strategi Penyelesaian dan Langkah Antisipasi	58
Tabel 2.9 Tabel Target dan Realisasi IKK Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	60
Tabel 2.10 Tabel Target dan Realisasi IKK Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	62
Tabel 2.11 Tabel Penyerapan Anggaran Setiap IKK	66
Tabel 2.15 Tabel Realisasi dan Anggaran Setiap IKK	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.0 Peningkatan Jumlah Entri KBBI per Tahun	20
Grafik 2.1 Tabel Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran	63
Grafik 2.2 Tabel Realisasi Per Jenis Belanja	65
Grafik 3.1 Realisasi Anggaran 2023	80

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2023 menyajikan tingkat capaian tiga sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian dan ketidak capaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2023 adalah sebagai berikut



SK 1	Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra		
IKK 1.1	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra		
Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
42	41	50	43

SK 2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra		
IKK 2.1	Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra		
Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
6	6	7	8

SK 3	Meningkatnya Tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		
IKK 3.1	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		
Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
BB	BB	A	BB

IKK 3.2	Jumlah Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		
Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target Renstra 2024
91	91	91,81	91

HAMBATAN

LANGKAH ANTISIPASI

Belum tersedia SDM dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk menduduki posisi jabatan yang dibutuhkan

1

Pengajuan permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Belum didukung oleh perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai sehingga waktu bekerja menjadi tidak efisien

2

Pengajuan pengadaan perangkat komputer baru yang memadai.

Anggaran yang tidak sepadan dengan tagihan produk dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan

3

Diskusi secara intensif dengan para pakar, praktisi, satuan pendidikan, dan mitraDudi untuk bekerja sama melalui swakelola dalam pembuatan produk yang sesuai secara kualitas dan kuantitas

Belum optimalnya komitmen dan konsistensi dalam mematuhi jadwal pelaksanaan anggaran

4

Melakukan rapat rutin terkait jadwal rencana kegiatan

BAB I PENDAHULUAN



A. GAMBARAN UMUM

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merupakan satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa). Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pertama kali dibentuk pada bulan Desember tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 dengan nama Pusat Pengembangan dan Pelindungan. Pada tahun 2019 terjadi kembali perubahan nomenklatur menjadi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan disahkan melalui Permendikbud Nomor 9 tahun 2019.

Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Gambar 1.1 Perkembangan Nomenklatur Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Pada tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan jumlah SDM sebanyak 80 pegawai (70 PNS dan 10 PPNPN). Untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan rincian tugas melaksanakan analisis pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Untuk itu dalam mewujudkan kinerja pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dengan hasil maksimal dibutuhkan kelompok jabatan administrasi (JA), jabatan fungsional (JF), dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).



Gambar 1.2 Gedung Kantor Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan profesionalisme maka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membentuk 10 KKLP (Kelompok Keahlian dan Layanan Profesional) yang menaungi jabatan teknis. Pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdapat 2 KKLP, yaitu KKLP Perkamusian dan Peristilahan dan KKLP Pelindungan dan Pemodernan yang masing-masing merupakan naungan staf teknis dalam melaksanakan tugas secara profesional. Sebelum tahun 2022 beban pekerjaan yang terkait analisis pengembangan dan pelindungan Bahasa dan sastra dibebankan pada jabatan fungsional peneliti namun mulai tahun 2023 dialihkan fungsinya ke jabatan fungsional Widyabasa. Jabatan fungsional Widyabasa memiliki tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Sedangkan dalam rangka penataan sumber daya manusia terkait dengan tugas dan fungsi penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan), maka terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu (peneliti) melakukan integrasi dan peleburan ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dengan diikuti perpindahan pegawai terkait. Wilayah kerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 1.3 Foto seluruh pegawai Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Rekap Data Pegawai
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

♀♂	Laki-Laki	Perempuan	🎓	S-3	S-2	S-1
	29	48		2	16	45
🏛️	PNS	PPNP	DIII	SMA/SMK		
	68	9		6	3	

Gambar 1.4 Rekap Data Pegawai

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran, dan laporan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa Dan Kantor Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
14. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas untuk “Melaksanakan Penyiapan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra”

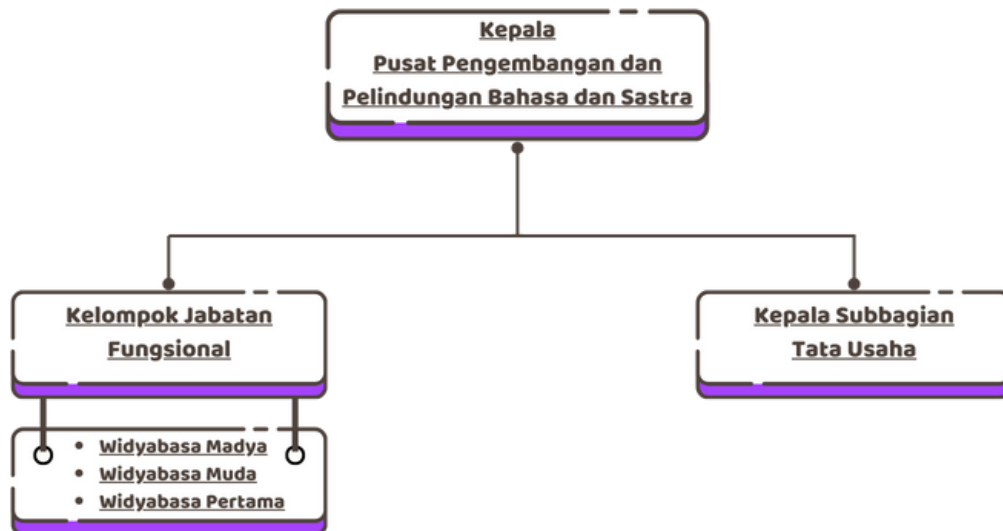
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
2. Pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. Pengelolaan kebhinekaan bahasa;
4. Pembakuan dan kodifikasi bahasa;
5. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat

STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas satu Kepala Pusat (eselon II), satu Kepala Subbagian Tata Usaha (eselon IV), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebagai berikut.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu Strategis

1. Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra di Indonesia sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa
2. Perlunya menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan serta akses yang mudah bagi masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia
3. Kaidah kebahasaan yang telah tersusun saat ini belum sepenuhnya dimanfaatkan serta sikap positif penutur terhadap bahasa Indonesia sebagai kekayaan dan warisan budaya bangsa masih rendah
4. Terbukanya batasan-batasan budaya dan cepatnya perkembangan teknologi terus mendorong masuknya kosakata-kosakata asing dan munculnya kosakata baru di masyarakat.
5. Masifnya perkembangan teknologi menuntut kecepatan dan kemudahan untuk mengakses kebutuhan produk-produk kebahasaan. Namun, belum semua produk kebahasaan bisa dijangkau secara digital, serta informasi tentang produk dan cara penggunaannya belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
6. Daya hidup (vitalitas) bahasa daerah yang beragam, bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu.
7. Luasnya jangkauan wilayah pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.
8. Masyarakat di daerah (terutama generasi muda) cenderung mulai meninggalkan bahasa daerah.
9. Komunitas sastra yang tidak sedikit masih berkembang dan belum mapan, timbul tenggelam, tidak menentu sehingga eksistensinya perlu mendapatkan perhatian serius

Peran Strategis

1. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik (*good governance*) melalui akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.
2. Berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra di nusantara.
3. Berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra.
4. Berperan penting dalam melakukan pembakuan dan kodifikasi Bahasa dan Sastra.
5. Berperan penting dalam menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan.

Tapak Tekat Gesit Ksatria Elang-Rajawali

TAPAK bukan hanya jejak, tetapi tekad untuk: Tertib, Akuntabel, Profesional, Amanah, dan Kompeten. **TEKAD** tidak sekedar niat, ia ejawantah dari sikap: Taat, Egaliter, Kreatif, Adaptif, dan Dinamis. Gambaran betapa **GESIT**-nya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ibarat gerak dari Elang Rajawali yang Giat, Elaboratif, Solutif, Inovatif, dan Transformatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

VISI Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam rencana strategis tahun 2020—2024 yang mengacu kepada visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra, yaitu

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra”

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

B. MATRIKS KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2020–2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rencana Kinerja Jangka Menengah

Kode	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Perjanjian Kinerja		
		2022	2023	2024
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	40	41	43
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra			
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra	6	6	8
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
IKK	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB	BB	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91	91	91

C. TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Rencana Strategis menetapkan tujuan untuk tahun 2024 yang lalu di turunkan lagi menjadi tujuan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, yaitu:

Tabel 1.2 Tujuan Strategis

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
Meningkatnya kelestarian Bahasa daerah	Indeks pemanfaatan Bahasa daerah oleh penuturnya	20,54

Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
--	--	---

D. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020--2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

Tabel 1.3 Perjanjian kinerja awal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	41
2.	[SK 2] Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6
3.	[SK 3] Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9.519.915.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	29.364.379.000

Pada pelaksanaannya, di akhir tahun Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengalami perubahan pagu anggaran. Pagu anggaran DIPA awal sebanyak Rp38.884.294.000,00 mengalami perubahan anggaran dengan realokasi belanja gaji pegawai ke Sekretariat Badan sebesar Rp276.000.000,00. Pada akhir tahun pagu anggaran pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menjadi Rp38.608.294.000,00 sehingga perlu dilakukan revisi perjanjian kinerja. Berikut adalah revisi perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Perjanjian Kinerja Akhir

Tabel 1.4 Perjanjian kinerja akhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1.	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	41
2.	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6
3.	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	9.243.915.000
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	29.364.379.000

E. PROGRAM PRIORITAS

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020–2024, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra ikut serta dalam menyukseskan tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki satu kegiatan atau rincian output (RO) berstatus prioritas nasional yang turut mendukung program prioritas nasional dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Gambar 1.6 Program Prioritas Badan Bahasa

Tabel 1.5 Program Prioritas Nasional Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

No	Program Prioritas Nasional	Rincian Output
1	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	[2021.QMA.001] Produk Kodifikasi Bahasa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja kegiatan, dengan tingkat ketercapaian selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	41	50	122%
2.	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6	7	117%
3.	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB	A	113%
		3.2	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91	91,81	101 %

1. Sasaran Kegiatan I

Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang terukur melalui indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2023 yang meningkat hingga 88.07 % dari 81,02% pada tahun sebelumnya, serta partisipan perlindungan bahasa dan sastra yang meningkat dari target 3.742 orang tercapai 4.903 orang, terus mendorong peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Hal ini juga direpresentasikan oleh penutur Bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas bahasanya. Capaian ini perlu didukung dan dikembangkan, salah satunya melalui penyediaan produk pengembangan Bahasa;

Produk pengembangan bahasa yang dimaksud adalah produk hasil kodifikasi bahasa yang disusun untuk menjadi acuan penutur bahasa Indonesia. Tersedianya produk pengembangan bahasa dapat dicapai dengan berbagai upaya seperti inventarisasi kosakata, penyusunan kamus dan acuan kebahasaan, serta integrasi kosakata dengan TIK. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi maju untuk terus menjaga stabilitas ketersediaan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas ketersediaan produk pengembangan bahasa sehingga dapat menjadi alat untuk menyamakan persepsi terkait kebahasaan serta sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tahun 2023, Tim Perkamus dan Peristilahan telah menghasilkan satu KBBI termutakhirkan, empat kamus bidang ilmu, empat kamus etimologi, empat produk integrasi kosakata dengan TIK, dan dua produk pedoman kebahasaan.

Selain produk pengembangan bahasa, Pusbanglin juga melaksanakan penyediaan produk pengembangan sastra. Pengembangan sastra merupakan upaya untuk menggali, memperluas, dan menginterpretasikan karya sastra yang tersedia atau menciptakan karya baru yang terinspirasi dari karya-karya yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mengenalkan sastra kepada masyarakat secara menarik. Pengembangan sastra bertujuan untuk menjaga keberlanjutan apresiasi terhadap karya sastra, mendorong kreativitas, dan menyediakan produk pemodernan sastra agar dapat diakses oleh masyarakat secara mudah.

Tersedianya produk pengembangan sastra dilakukan melalui dua cara, yakni (a) pemodernan karya sastra dan (b) penyusunan bahan pengembangan sastra untuk pengayaan konten aplikasi Ensiklopedia Sastra Indonesia. Pemodernan sastra dalam bentuk film animasi telah menghasilkan sejumlah 33 film, sedangkan penyusunan bahan pengembangan sastra lainnya sebanyak 4 bahan. Dengan demikian seluruh jumlah yang berhasil dikembangkan dalam produk pengembangan sastra Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) pada tahun anggaran 2023 sebanyak 37 produk. Selain mengembangkan produk, Pusbanglin juga memberikan fasilitasi kepada para pelaku sastra, baik kelompok (komunitas) maupun

perseorangan melalui program Bantuan Pemerintah yang diluncurkan perdana pada 2023. Bantuan tersebut sebanyak 79 paket Bantuan yang diberikan kepada komunitas sastra dan sastrawan terpilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

1.1. Indikator Kinerja Kegiatan I.1

Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Tabel 2.2 Target dan Realisasi IKK
Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	Tahun 2023			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	42	41	50	107,69%	136	104	76%

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat. Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah dengan menghitung jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun

2023 indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan dari produk kodifikasi bahasa dan produk pengembangan sastra.

Realisasi IKK jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 41 produk telah terealisasi sebanyak 50 produk dengan persentase capaian sebesar 107,69%. Lima belas produk tersebut dihasilkan dari Kodifikasi Bahasa:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Keamanan Maritim
- Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Peperangan Asimetris
- Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Jurnalistik
- Kamus Bidang Ilmu Teknologi Informasi Subbidang Kecerdasan Artifisial
- Kamus Etimologi Bahasa Belanda
- Kamus Etimologi Bahasa Portugis
- Kamus Etimologi Bahasa Persia
- Kamus Etimologi Bahasa Inggris
- Kamus Pemelajar
- Aplikasi Penyuntingan Bahasa Indonesia (Sipebi)
- Korpus Indonesia (Koin)
- Acuan Kebahasaan
- Padanan Istilah (Pasti)
- Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI)

Disamping 15 produk pengembangan bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menghasilkan 33 produk pengembangan sastra dalam bentuk alihwahana film animasi, yaitu:

Tabel 2.3 Judul 33 film animasi

No	Judul Film	Sumber Cerita	Daerah Asal
1	Pertarungan Kongga	Asal-Usul Gunung Mekongga	Sulawesi Tenggara
2	Vova Sanggayu	Vova Sanggayu	Sulawesi Barat
3	Hikayat Lumba-Lumba	Asal-Usul Lima Sungai Besar	Sulawesi Selatan
4	Mancaka	Legenda Batangkinang	Riau
5	Mah Bongsu dan Ular Ajaib	Dongeng Sungai Jodoh	Kepulauan Riau
6	Bujang Rahman Si Ikan Semah	Asal-Usul Batang Merao	Jambi

7	Bulalo Lo Limutu	Legenda Bulalo Lo Limutu	Gorontalo
8	Puang Katoan	Puang Katoanna	Sulawesi Utara
9	Pusentasi	Putri Yamamore dan Terjadinya Pusentasi	Sulawesi Tengah
10	Ini Tanah Kami!	Legenda Pulau Datu	Kalimantan Selatan
11	Naga dan Buaya	Legenda Pulau Mintin	Kalimantan Tengah
12	Senong Ingin ke Pesta	Legenda Batu Betarup	Kalimantan Barat
13	Harta Karun Gampong Pande	Gampong Pande: Cikal Bakal Kota Banda Aceh	Aceh
14	Amat dan Epin: Kisah dari Desa Lubuk Kertang	Asal-Usul Lubuk Kertang	Sumatera Utara
15	Legenda Boko dan 5 Pulau	Legenda Si Boko	Sumatera Barat
16	Cinto di Kemaro	Asal Usul Pulau Kemaro	Sumatera Selatan
17	Idak Bekesudahan	Asal-Mula Danau Dendam Tak Sudah	Bengkulu
18	Penyu Busuk	Asal-Usul Tanjung Penyusuk	Kepulauan Bangka-Belitung
19	Warisan Pangeran Condet	Legenda Condet	DKI Jakarta
20	Batu Kuwung	Legenda Batoe Koewoeng	Banten
21	Sumur Putri	Legenda Sumur Putri	Lampung
22	Jurnal Si Kembar: Baroklinting Sang Pusaka	Legenda Rawa Pening	Jawa Tengah
23	Jurnal Si Kembar: Kembang Bulan yang Jelita	Legenda Desa Kembang	Daerah Istimewa Yogyakarta
24	Jurnal Si Kembar: Kutukan Bagendit	Legenda Situ Bagendit	Jawa Barat
25	Tanjung Munanges	Tanjung Munanges	Nusa Tenggara Barat
26	Nyanyian Sri Tanjung	Sri Tanjung	Jawa Timur
27	Legenda Goa Raksasa	Asal Usul Nama Banjar Angkah/Legenda Gok Raksasa	Bali
28	Kisah Memeua dan Kobubu	Asal Mula Terjadinya Telaga Paca	Maluku Utara

29	Perjalanan Putri Majapahit ke Negeri Ema	Way Mojopahit (Air Majapahit)	Maluku
30	Kisah Dua Gembala dan Nene Be Lana	Fatu Atoni	Nusa Tenggara Timur
31	Ekspedisi Kombeng	Gua Kombeng	Kalimantan Timur
32	Lahaibara	Legenda Pulau Hanyut	kalimantan Utara
33	Ren, Rui, dan Saireri	Legenda Selat Saireri	Papua

Ditambah juga dengan 4 produk Target akhir Renstra revisi 2020—2024 untuk jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah sebanyak 136 produk. Sampai dengan tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 104 produk pengembangan bahasa dan sastra.

Analisis program dan kegiatan, yang mendukung perealisasi target kinerja Indikator Kinerja, yaitu sebagai berikut.

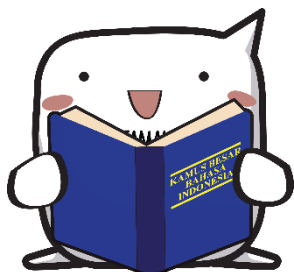
❖ **PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA**

Pada tahun 2023 Tim Perkamusan dan Peristilahan telah melakukan peluncuran KBBI Daring, penyusunan empat buah kamus bidang ilmu dan empat kamus etimologi, Penambahan fitur Morfologi pada aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (Sipebi), Pemutakhiran pada aplikasi Korpus Indonesia (KOIN), Acuan Kebahasaan, dan Aplikasi Padanan Istilah, selain itu juga melakukan pemutakhiran pada Pedoman Umum Pembentukan istilah (PUI)

Penghitungan produk pengembangan bahasa yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu dilakukan berdasarkan perhitungan akumulasi jumlah produk. Pada tahun 2023, indikator jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra didukung oleh kegiatan dari produk kodifikasi bahasa. Realisasi IKK jumlah produk pengembangan bahasa 2023 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 13 produk telah terealisasi sebanyak 15 produk dengan persentase capaian sebesar 187%. Perincian dari produk yang terealisasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

Pada pembukaan Kongres Bahasa Indonesia XII, 25 Oktober 2023 lalu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meluncurkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) IV Daring yang memuat:



- 1.202 entri baru, 1.268 makna baru, dan 3.068 perbaikan makna;
- informasi etimologi (yang sudah dapat diakses: etimologi Sanskerta, Jawa Kuno, Cina, Arab);
- pelafalan dan penulisan yang sudah disesuaikan dengan kaidah terbaru, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) V; dan
- aplikasi kompilasi kamus (khusus admin) yang memudahkan admin menyunting dan memutakhirkan data.



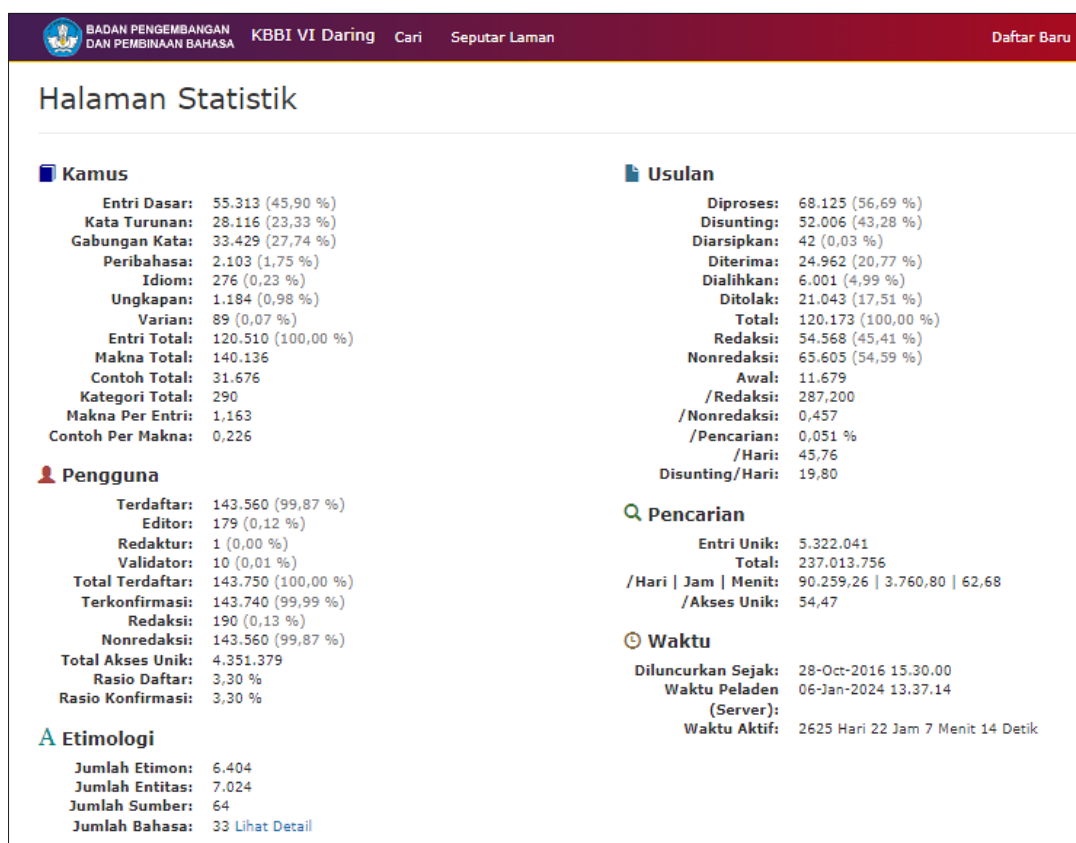
Gambar 2.1 Tampilan Baru KBBI VI Daring

Tahun 2023, sebanyak kurang lebih 80.000 entri baru akan ditambahkan, sehingga total entri dalam KBBI Daring akan mencapai 200.000. Hal ini menjadi salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Grafik 1.0 Peningkatan Jumlah Entri KBBI per Tahun



Selain penambahan entri, laman KBBI Daring juga mengalami peningkatan dari segi pengguna, usulan, dan pencarian, seperti yang dapat dilihat dalam Gambar.



Gambar 2.2 Statistik KBBI Daring

Penambahan entri KBBI didapat dari usulan masyarakat atau mancadaya dan inventarisasi kosakata yang dilaksanakan oleh Balai dan Kantor Bahasa. Pada 2023 hasil inventarisasi kosakata yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Hasil Inventarisasi Kosakata Balai/Kantor tahun 2023

No.	Balai/Kantor	Target Entri	Usulan Awal	Usulan Entri Terverifikasi
1	Balai Bahasa Provinsi Aceh	400	600	345
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara	500	504	298
3	Balai Bahasa Provinsi Riau	500	489	265
4	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat	500	500	250
5	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan	500	1218	162
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	500	516	457
7	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	450	503	471
8	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	100	156	137
9	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	500	693	535
10	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	1000	1121	883
11	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	500	576	531
12	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	800	1174	1123
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	500	505	429
14	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	500	640	581
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	500	336	637
16	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	500	699	430
17	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	500	509	347
18	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	500	501	326
19	Balai Bahasa Provinsi Bali	500	540	510
20	Balai Bahasa Provinsi Papua	500	522	282
21	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	651	662	456
22	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	700	976	260
23	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	600	677	402
24	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	600	1050	783
25	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	250	328	272
26	Kantor Bahasa Provinsi Banten	500	543	458
27	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	500	500	380
28	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	600	1091	773
29	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	600	701	194
30	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	750	1239	403
	TOTAL	16.001	20.069	13.380

2) Kamus Bidang Ilmu (KBI)

Kamus Bidang Ilmu merupakan kamus yang digunakan sebagai rujukan yang memuat sejumlah istilah yang disusun secara alfabetis disertai dengan definisinya. Kamus Bidang Ilmu sangat diperlukan untuk memperluas wawasan para ilmuwan khususnya para dosen, mahasiswa, penerjemah, dan lain-lain ketika mereka memerlukan padanan dan makna suatu kata. Kamus ini dapat memberikan informasi tentang istilah khusus suatu bidang ilmu, padanan, dan maknanya. Kamus Bidang Ilmu ini menjadi penting karena memuat istilah, padanan, dan definisi dari berbagai bidang ilmu. Tahun 2023, Tim Perkamusian dan Peristilahan telah menyelesaikan empat buah kamus bidang ilmu, yakni Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Keamanan Maritim, Kamus Bidang Ilmu Pertahanan Subbidang Peperangan Asimetris, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi Subbidang Jurnalistik, dan Kamus Bidang Ilmu Teknologi Informasi Subbidang Kecerdasan Artifisial. Jumlah entri yang dicapai melalui empat kamus bidang ilmu tersebut sebanyak 3.534 kosakata, jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yaitu 3.297 kosakata.



Gambar 2.3 Sampul Kamus Bidang Ilmu

Penyusunan Kamus Bidang Ilmu dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pendefinisian, verifikasi, dan penyuntingan. Dalam pengumpulan data, penyusun mencari data dari berbagai terbitan, baik cetak maupun elektronik. Data itu lalu dicatat termasuk konteks, kelas kata, definisi (jika ada), sumber konteks, dan sebagainya. Data hasil seleksi didefinisikan sesuai dengan konteks pemakaiannya dengan merujuk berbagai sumber, baik sumber cetak, lisan, maupun sumber elektronik (internet). Definisi didasarkan pada prinsip-prinsip leksikografi dan ejaan yang benar. Data yang sudah didefinisikan dan dianggap layak kemudian diverifikasi melalui Sidang Komisi Istilah (SKI) untuk melihat kesesuaian dengan ejaan dan memenuhi syarat dalam penguasaan bahasa dan prinsip-prinsip leksikografi. Pada tahap tersebut, dilakukan verifikasi entri tertentu kepada ahlinya sebelum ditetapkan sebagai entri dalam kamus. Setelah substansi dalam

definisi diverifikasi, entri beserta penjelasannya kemudian disunting secara bahasa sesuai dengan kaidah EYD, serta sesuai dengan prinsip leksikografi.

3) Kamus Etimologi

Selain Kamus Bidang Ilmu, pengembangan kamus juga dilakukan dengan penyusunan kamus etimologi. Saat ini, kosakata bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, Cina, Belanda, Jawa Kuno, dan sebagainya. Penyerapan kosakata tersebut dilakukan melalui berbagai cara, yaitu pepadanan, penerjemahan, serta penyesuaian penulisan dan pelafalan. Dalam KBBI, tidak semua kosakata yang terserap dari bahasa asing diberi label bahasa asal. Oleh karena itu, informasi etimologis perlu untuk terus ditambahkan pada kosakata yang diserap dari bahasa asing agar asal-asul kata tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terdata dengan baik. Dengan demikian, penyusunan kamus etimologi ini sangat diperlukan untuk menunjang program pengembangan kamus.



Gambar 2.4 Sampul Kamus Etimologi

Tahun 2023, Tim Perkamusan dan Peristilahan telah menyusun empat kamus etimologi, yaitu Kamus Etimologi Bahasa Belanda, Bahasa Portugis, Bahasa Persia, dan Bahasa Inggris dengan rincian jumlah entri Kamus Etimologi Bahasa Belanda 600, Bahasa Portugis 200, Bahasa Persia 200, dan Bahasa Inggris 1000. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya karena saat itu Tim Perkamusan dan Peristilahan hanya menyusun tiga Kamus Etimologi.

4) Kamus Pemelajar



Gambar 2.5 Sampul Kamus Pemelajar

Tahun 2023, untuk pertama kalinya dalam kegiatan pengembangan kamus, Tim Perkamusan dan Peristilahan menyusun Kamus Pemelajar. Kamus Pemelajar disusun khusus untuk penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia dan tidak terkait dengan tingkatan usia. Kamus ini juga dapat memberikan penjelasan pemilihan kata dan makna yang tepat dalam berbagai situasi. Keberadaan Kamus Pemelajar sangat penting karena jumlah pemelajar dan lembaga pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) yang semakin meningkat, sementara ketersediaan kamus pemelajar bahasa Indonesia kurang mendukung pembelajaran,

terutama dalam hal sasaran pengguna dan pemilihan lema. Selain itu, berbagai bahasa lain juga telah memiliki kamus pemelajarnya masing-masing, seperti bahasa Inggris, Korea, dan Jepang, sehingga penyusunan kamus ini dapat berkontribusi dalam tren pengajaran bahasa mutakhir.

Kegiatan Pengembangan Kamus: Kamus Pemelajar 2023 berfokus pada pemeriksaan ulang data mentah yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pemeriksaan data dilakukan pada unsur entri, lafal, kelas kata, definisi, serta penambahan catatan penggunaan dan ilustrasi. Ada beberapa fitur khas yang membedakan kamus pemelajar ini dengan kamus-kamus yang lain. Di antaranya adalah fitur berikut.

- Penyusunan kamus pemelajar didasarkan pada korpus bahasa Indonesia yang ada dalam *Sketchengine*, yaitu Indonesian Web 2020 (idTenTen20) dan Indonesian Web (IndonesianWaC).
- Definisi yang disajikan dalam kamus pemelajar menggunakan kata-kata sederhana, sering digunakan, tetapi cakupan penggunaannya luas.
- Contoh yang digunakan dalam kamus pemelajar diambil dari penggunaan yang lazim dan alamiah dalam bahasa Indonesia.
- Kolokasi dalam kamus pemelajar meliputi kolokasi yang sangat erat (misalnya idiom dan majemuk kata) atau kolokasi yang lebih longgar (misalnya ungkapan fatis dan gabung kata).

- Bentuk derivasi yang disajikan dalam kamus pemelajar merupakan bentuk derivasi yang paling sering digunakan sehingga tidak semua bentuk derivasi potensial dapat masuk sebagai sublema.
- Catatan penggunaan diberikan pada entri yang memiliki konsep budaya yang khusus atau keunikan tertentu yang tidak ditemukan atau berbeda dengan bahasa lain.

5) Sipebi



Gambar 2.6 Tampilan tatap muka Aplikasi Sipebi

Untuk memberikan pelayanan terbaik dan menunjang kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan aplikasi kebahasaan, Tim Perkamusan dan Peristilahan terus mengembangkan aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan Sipebi. Sipebi telah populer digunakan oleh masyarakat sejak diluncurkannya pada tahun 2021. Sipebi merupakan aplikasi penyuntingan bahasa yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi tersebut menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan dari ahli bahasa. Aplikasi ini

bersifat luring mudah alih (*portable*) dan dapat diunduh melalui KBBI Daring. Hingga Desember 2023, aplikasi Sipebi sudah diunduh sebanyak 120.126 kali. Dengan demikian terdapat kenaikan jumlah pengunduh sebanyak 35.580 dari jumlah tahun lalu. Sebagai sebuah aplikasi yang menelaah jenis kesalahan bahasa tulis, Sipebi membutuhkan data yang banyak serta pemrograman yang akurat. Oleh sebab itu, aplikasi Sipebi juga diluncurkan sebagai proyek urun daya semiterbuka. Dengan demikian, pengguna awam, kontributor linguistik, dan pengembang teknologi informasi yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan dan penyempurnaan Sipebi dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Di samping itu, Sipebi versi beta juga diluncurkan agar masyarakat memiliki akses ke Sipebi yang belum resmi, tapi termutakhir. Sipebi versi beta dapat dimutakhirkan sewaktu-waktu jika terdapat pengembangan maupun fitur baru sebelum secara resmi dimasukkan ke dalam SIPEBI versi resmi jika pengembangan atau fitur tersebut telah bekerja dengan baik.

Tahun 2023, fokus utama pengembangan SIPEBI adalah penambahan fitur morfologi. Dengan adanya fitur ini, Sipebi akan mengenali tidak hanya kesalahan dalam ejaan bahasa Indonesia, tetapi juga dapat mengenali aturan-aturan rumit dalam morfologi bahasa Indonesia. Di samping itu, penambahan beberapa kaidah EYD juga dilakukan. Berikut komponen-komponen yang disusun oleh pengembang dalam upaya penambahan fitur morfologi.

- Data 1: Aturan morfologi
- Data 2: Pola kesalahan morfologi
- Data 3: Kamus (kata/kalimat) terindeksasi
- Data 4: Kamus morfologi
- Data 5: Data Sipebi di luar data morfologi dan penyuntingan berdasarkan EYD
- Data 6: Data tambahan penyuntingan berdasarkan EYD

6) Korpus Indonesia (Koin)

Korpus merupakan kumpulan kata dalam teks yang diolah secara elektronik untuk mengetahui penggunaan bahasa di suatu masyarakat. Korpus Indonesia (Koin) memuat teks-teks berbahasa Indonesia dari berbagai bidang dan jenis. Data Koin berasal dari berbagai sumber tulis dan lisan, seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dari beberapa universitas terkemuka di Indonesia, artikel media massa, teks sastra, baik klasik maupun modern, serta dokumen resmi dan perundang-undangan. Data ini akan terus dikembangkan hingga mencakup penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan dan menjadi sumber data kebahasaan yang komprehensif. Koin akan menjadi korpus umum atau korpus monitor bahasa Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian bahasa, penyusunan kamus, pembelajaran bahasa, dan sebagainya.

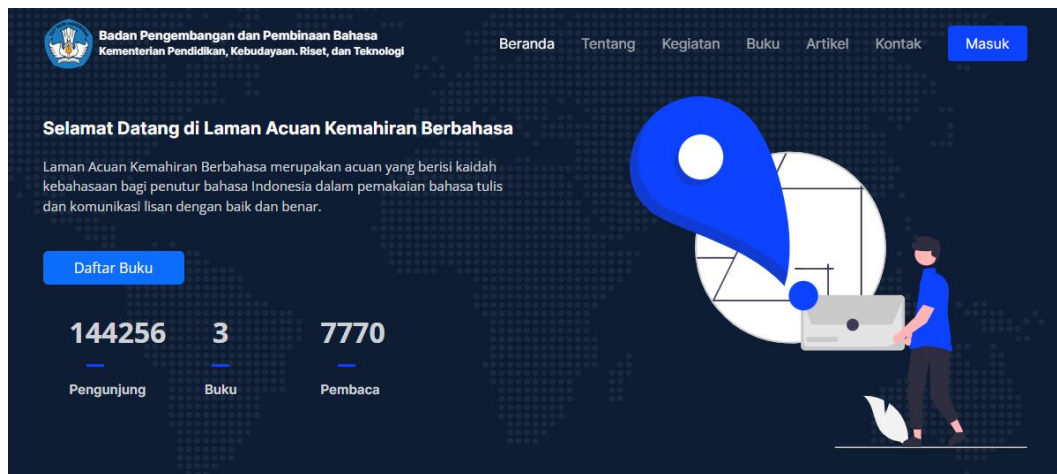
Pemutakhiran Koin tahun 2023 meliputi:



Gambar 2.7 Logo Korpus Indonesia

- penambahan ruang untuk korpus lisan;
- penambahan sistem untuk *timing* kalimat *file audio*;
- migrasi basis data ke Apache Cassandra;
- penyesuaian *query* untuk peningkatan performa pencarian; dan
- penambahan korpus teks sebanyak 3.670.033 token, dari 24.736.534 menjadi 28.406.567, serta
- penambahan korpus lisan sebanyak 1.500.000 token.

7) Acuan Kebahasaan



Gambar 2.8 Laman Acuan Kemahiran Berbahasa

Acuan Kebahasaan merupakan laman acuan kemahiran berbahasa yang berisi kaidah kebahasaan bagi penutur bahasa Indonesia dalam pemakaian bahasa tulis dan komunikasi lisan dengan baik dan benar. Acuan Kebahasaan juga dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan dan memberi gagasan ilmiah bagi masyarakat yang menekuni bidang kebahasaan, khususnya kodifikasi bahasa, pendokumentasian kosakata, penyusunan kamus, serta pepadanan istilah. Tahun 2023, Tim Perkamusan dan Peristilahan melaksanakan kegiatan Integrasi Produk dengan TIK: Acuan Kebahasaan, yang dilaksanakan untuk memutakhirkan Acuan Kebahasaan dengan hasil pemutakhiran sebagai berikut:

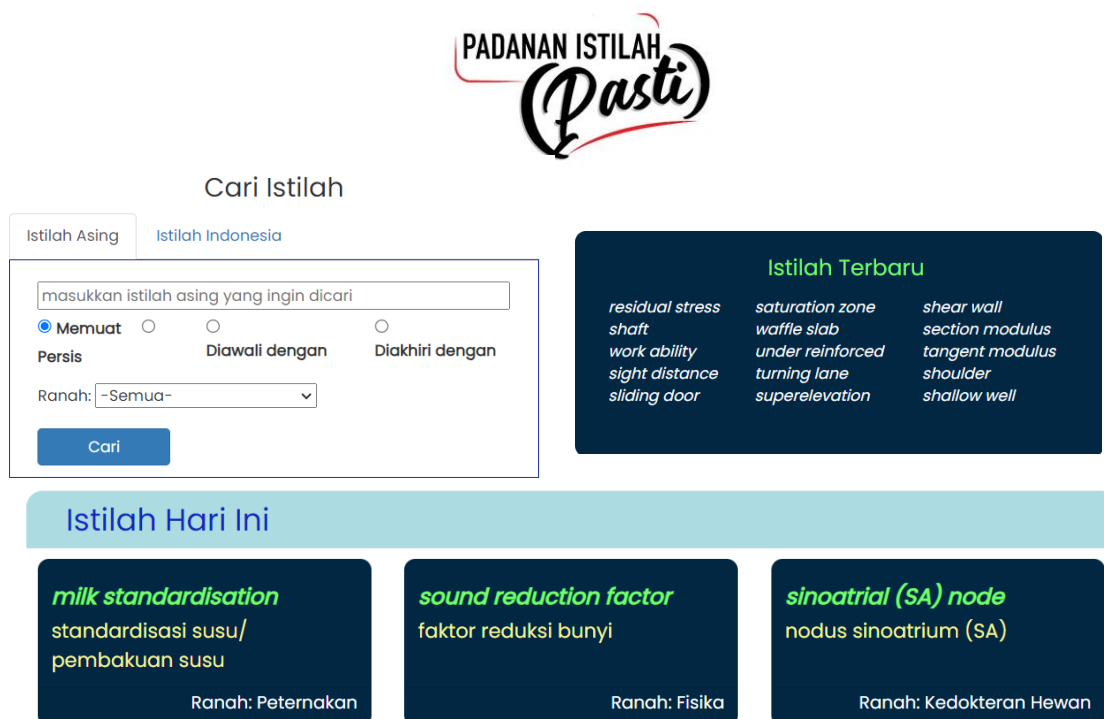
- penggantian laman framework laravel menjadi native, sehingga menjadi lebih mudah dikembangkan;
- perbaikan sistem “masuk”;
- penyediaan fitur pengunduhan buku dalam bentuk PDF;
- perbaikan tampilan buku; serta
- perbaikan tampilan laman.

Upaya pemutakhiran Acuan Kebahasaan ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk membuat laman lebih mudah diakses, lebih berorientasi pengguna, serta lebih informatif

8) Aplikasi Padanan Istilah (PASTI)

Padanan Istilah (Pasti) merupakan aplikasi pangkalan data pemadanan istilah asing yang saat ini dikembangkan oleh Tim Perkamusan dan Peristilahan. Sebelumnya, aplikasi ini dikembangkan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Aplikasi ini digunakan untuk menyebarkan istilah bahasa Indonesia sebagai bentuk padanan dari istilah asing yang terus berkembang dan masuk ke Indonesia. Hingga Desember 2023, aplikasi Pasti telah memuat 167.897 istilah dari 45 ranah, tahun sebelumnya Pasti memuat 157.008 istilah dengan 38 ranah. Tahun 2023, Tim Perkamusan dan Peristilahan juga telah melaksanakan pemutakhiran Pasti untuk meningkatkan kinerja aplikasi menjadi lebih ramah pengguna serta data yang ada di dalamnya semakin komprehensif. Selain itu, melalui pemutakhiran ini, diharapkan akses publik untuk mencari rujukan padanan istilah akan menjadi lebih mudah. Berikut perubahan yang dilakukan dalam pemutakhiran Pasti 2023.

- Fitur istilah hari ini, istilah populer, dan istilah terbaru, saat ini dapat dilihat pada halaman muka aplikasi Pasti.
- Pilihan pencarian padanan berdasarkan bahasa, yaitu berdasarkan istilah asing atau istilah Indonesia, saat ini dapat dilakukan.
- Pengguna terdaftar dapat berpartisipasi untuk mengusulkan istilah dalam aplikasi Pasti.
- Jumlah istilah dan ranah meningkat.



Gambar 2.9 Logo dan Tampilan Tatap Muka Aplikasi Padanan Istilah

9) Pedoman Umum Pembentukan Istilah



Gambar 2.10 Sampul Pedoman Umum Pembentukan Istilah

Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUI) telah menjadi rujukan sejak tahun 1975 ketika PUI edisi pertama diluncurkan. Pemutakhiran PUI terus dilakukan dengan terbitnya edisi kedua pada tahun 1998 dan edisi ketiga pada tahun 2004. Sejak edisi terakhir terbit, kosakata dan istilah bahasa Indonesia terus berkembang dengan amat pesat mengikuti perubahan zaman. Oleh karenanya, PUI sebagai pedoman pembentukan istilah sepatutnya selalu dimutakhirkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna bahasa. Usaha pemutakhiran PUI telah dilaksanakan pada tahun 2019 hingga tahap finalisasi namun belum disahkan.

Oleh karenanya, kegiatan pemutakhiran PUI akan merujuk pada naskah PUI yang disusun pada tahun 2019, dan dilakukan selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran

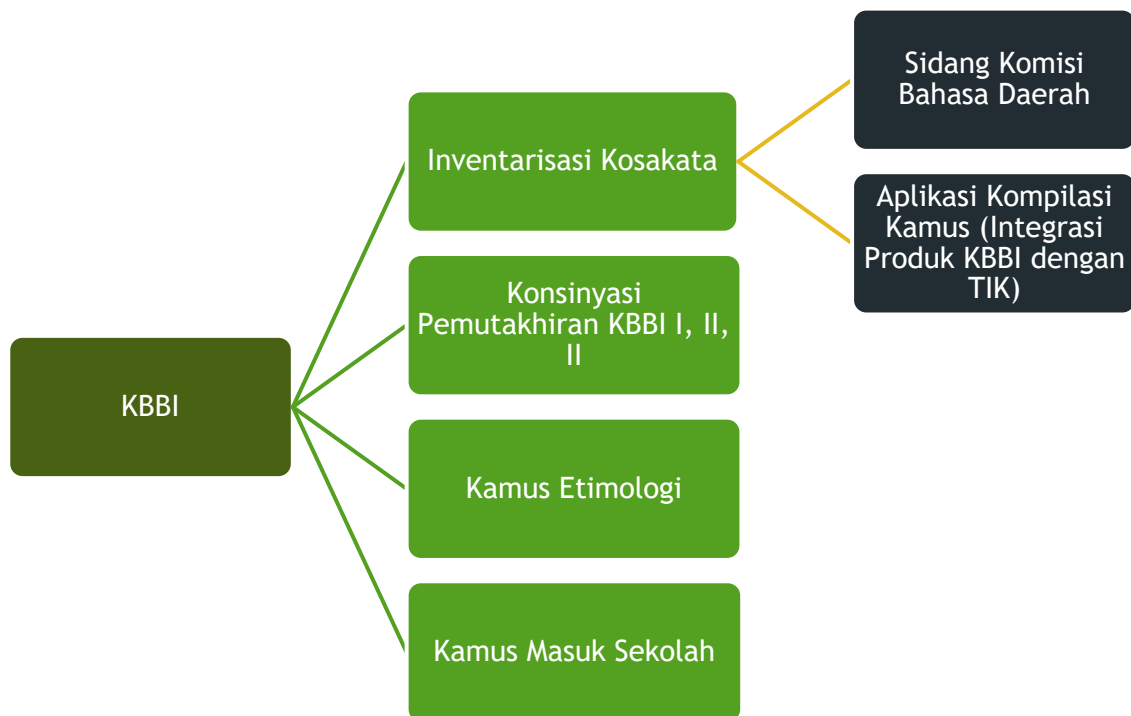
2023 akan melewati tahap seleksi dan elaborasi, sementara tahap selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 hingga akhirnya PUI termutakhir dapat diterbitkan dan disebarluaskan ke masyarakat.

Berikut hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh Tim Perkamus dan Peristilahan pada tahap seleksi dan elaborasi PUI 2023.

- Penyeragaman istilah, rumusan, dan bagan berdasarkan ISO 704 edisi ketiga 2009 tentang Terminology Work: Principles and Methods.
- Perumusan definisi secara konsisten.
- Penghapusan kaidah yang tidak sesuai dengan praktik saat ini.
- Penambahan, perbaikan, dan penomoran daftar contoh agar konsep, urutan, dan jumlahnya konsisten.
- Perbaikan redaksi seperti “frasa” menjadi “gabungan kata” untuk melenturkan penggunaan PUI.

Analisis Program dan Kegiatan Terkait, yang Mendukung Perealisisasian Target Kinerja Indikator Kinerja

Program, kegiatan, dan produk kodifikasi yang dikerjakan di oleh Tim Perkamusan dan Peristilahan saling terkait dan mendukung perealisisasian target kinerja Indikator Kinerja. Di antara program dan kegiatan yang menghasilkan produk kodifikasi itu adalah KBBI sebagai produk perkamusan dan Pasti sebagai produk peristilahan.



Gambar 2.11 Keterkaitan Produk KBBI dengan Kegiatan dan Perодук lain

Dalam upaya penambahan entri KBBI, selain didapat dari usulan masyarakat, didapat juga dari kegiatan Inventarisasi Kosakata yang dilakukan di UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Usulan dari Balai/Kantor Bahasa hasil dari kegiatan Inventarisasi Kosakata tersebut diseleksi melalui kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD). Hasil seleksi usulan kemudian diunggah ke Aplikasi Kompilasi Kamus (AKK). AKK adalah salah satu produk yang dihasilkan dari program Integrasi Produk KBBI dengan TIK. Selain itu, Kamus Etimologi juga berkontribusi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan padax penambahan entrinya, melainkan pada tambahan informasi dari entri serapan. Saat ini, informasi etimologi sudah dapat dilihat di KBBI untuk entri-entri yang berasal dari bahasa Arab, Cina, dan Sanskerta.

Selanjutnya, produk-produk leksikografi didiseminasikan dalam kegiatan Kamus Masuk Sekolah (KMS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan produk-produk leksikografi kepada siswa sekolah, sekaligus untuk memperkenalkan kepada mereka bagaimana cara merujuk,

menggunakan kamus cetak, daring, maupun luring, dalam mencari definisi dan memanfaatkannya untuk berbagai keperluan akademis.

Dalam aplikasi PASTI, penambahan padanan istilah juga didapat dari usulan masyarakat dan Sidang Komisi Istilah (SKI). Hasil dari SKI yang lain adalah Kamus Bidang Ilmu.



Gambar 2.12 Keterkaitan Produk PASTI dengan Kegiatan dan Peroduk lain

❖ PRODUK PENGEMBANGAN SASTRA

Indikator kinerja untuk produk pengembangan sastra adalah 33 film animasi yang dibuat tahun 2023, 33 film animasi dibuat berdasarkan legenda dari 30 provinsi di Indonesia. Sebanyak 33 film animasi di atas dapat diakses melalui tautan google drive.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEPVQCIKctt-0cLmipDbHPDvFjb6bNOIQJjnXythfAA/edit?usp=sharing`](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hEPVQCIKctt-0cLmipDbHPDvFjb6bNOIQJjnXythfAA/edit?usp=sharing)

1) Pemodernan Sastra dalam Bentuk Film Animasi

Pemodernan sastra yaitu mengalihwahanakan karya sastra yang berasal dari cerita rakyat, legenda, atau sejarah yang tersimpan dalam berbagai bentuk di daerah dalam bentuk produksi film animasi. Perkembangan zaman identik dengan modernitas di berbagai ranah. Dalam ranah sastra, modernitas menjadi sebuah tantangan untuk mengembangkan sastra sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, sastra perlu melewati pemodernan agar dapat menghasilkan produk-produk mutakhir yang mampu memenuhi tuntutan zaman. Kata pemodernan berarti proses (tindakan) memodernkan, sedangkan memodernkan berarti menjadikan (menyebabkan, membuat menjadi) modern. Pemodernan merupakan proses atau tindakan memodernkan agar berkembang dan berterima di tengah masyarakat. Pemodernan tidak hanya mencakup segi kemasan, tetapi juga isi atau jiwa dari karya sastra yang akan dimodernkan.

Sejak 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin) secara berkelanjutan menyusun produk pengembangan sastra berupa film animasi yang dialihwahanakan dari berbagai legenda Nusantara. Pengembangan tersebut berjumlah 32 film animasi dari 31 provinsi. Sementara di 2023, Pusbanglin mengembangkan 33 film animasi dari 33 provinsi. Pembuatan film animasi tersebut dilakukan dengan mengusung semangat kolaborasi dan gotong-royong yang menjadi semangat utama dari Merdeka Belajar.

Agar selaras dengan tujuan dan semangat kolaborasi tersebut, model kegiatan pemodernan sastra dalam bentuk film animasi tersebut dikelola dengan metode swakelola. Metode tersebut menjunjung kolaborasi dengan berbagai pihak, yaitu satuan pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, serta para *project coordinator*, serta mentor di kalangan akademisi, kemitraan dengan lembaga pemerintah, badan atau pelaku usaha/industri, masyarakat atau komunitas, studio serta media.



Gambar 2.13 Giat Proses Produksi Film Kolaborasi dengan Satuan Pendidikan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 32

Pembuatan Produk Pemodernan Sastra

Film Animasi Pemodernan Sastra
tayang di
Pekan Animasi Anak **INDONESIANA TV**

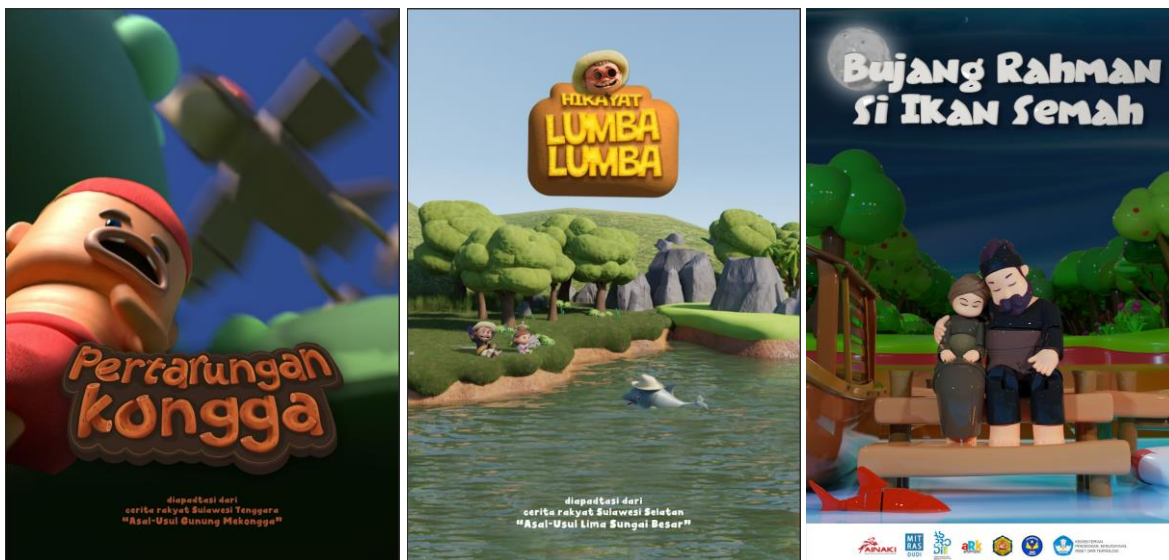
18 September 2023	19 September 2023	20 September 2023	21 September 2023
PINANG Kisah Perang Borneo 1800-1810 (10:00-10:30)	Legenda Pemodernan Sastra 1800-1810 (10:30-11:00)	Legenda Pemodernan Sastra 1800-1810 (11:00-11:30)	DUA GEMBALA DAN NENEK BE LANA Kisah Perang Borneo 1800-1810 (11:30-12:00)

8 universitas dan 14 Sekolah Menengah Kejuruan
 Alih wahan **legenda nusantara** dalam bentuk **film animasi** sebanyak **33 judul** 11 Tim Praktisi (tersebar di seluruh Indonesia)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 33

Gambar 2.14 Film Animasi Disiarkan di Indonesiana TV

Terdapat ketentuan dalam pemilihan cerita pada pembuatan produk film animasi dalam rangka pengembangan sastra tahun 2023 ini, yaitu cerita yang dipilih dapat dikembangkan dan ditayangkan di ruang publik, mendukung profil Pelajar Pancasila, berkaitan dengan toponimi, dan mendukung promosi destinasi wisata.





Gambar 2.15 Perwakilan Judul Film Animasi Hasil Pemodernan Sastra 2023

Sebanyak 33 film animasi tersebut terwujud atas kolaborasi antara Badan Bahasa dengan Asosiasi Industri Animasi Indonesia (Ainaki), Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitrasdudi Dirjen Vokasi), dan Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV). Ainaki selaku tim pakar bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan produk pemodernan sastra berupa film animasi yang dikerjakan oleh tim praktisi dan tim produksi. Tim Praktisi ditentukan berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dibuktikan melalui daftar riwayat hidup serta portofolio yang kemudian diseleksi oleh tim pakar dari AINAKI dan anggota Tim Kerja KKLK Pelindungan dan Pemodernan melalui rekrutmen terbuka. Tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi dan wawancara. Seleksi untuk tim produksi yang terdiri atas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) yang berada di bawah Mitrasdudi, serta universitas yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV) di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh Pusbanglin. Proses seleksi melibatkan pakar untuk menjamin kualitas tim yang terpilih.



Gambar 2.16 Kegiatan Peluncuran sekaligus Uji Keberterimaan Publik Produk Pemodernan Sastra 2023

2) Penyusunan Bahan Pengembangan Sastra

Bahan pengembangan sastra yang telah dikembangkan pada 2023 sebanyak empat (4) produk. Capaian ini menambah jumlah target output pada SK Tersedianya Produk Pengembangan Sastra. Pertama berupa bahan untuk pengayaan konten Ensiklopedia Sastra Indonesia. Kedua, berupa pedoman Ensiklopedia Sastra Indonesia. Bahan pengayaan konten aplikasi Ensiklopedia Sastra Indonesia berupa artikel. Selebihnya merupakan bahan pengayaan sastra lainnya.

Artikel tersebut terbagi atas artikel pengarang, karya sastra, penerbit sastra, lembaga sastra, sayembara sastra, dan gejala sastra. Pada 2023 dikembangkan artikel pengarang. Artikel pengarang yang berhasil diselesaikan pada 2023 sebanyak 250 artikel, 25 artikel di antaranya telah terverifikasi dan siap diunggah di aplikasi Ensiklopedia Sastra Indonesia. Aplikasi Ensiklopedia Sastra Indonesia merupakan aplikasi daring pengembangan dari versi cetak yang telah diluncurkan pada 2013 oleh Pusbanglin. Aplikasi tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai sastra Indonesia. Informasi mengenai sastra, baik pengarang, karyanya, lembaga, hadiah, maupun hal-hal yang terkait dengan kepengarangan dapat diperoleh dengan mudah melalui akses terhadap fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi. Aplikasi Ensiklopedia Sastra Indonesia memiliki empat menu utama yang terdapat di kiri atas laman, yaitu Beranda, Daftar Isi, Penyusun, dan Tentang. Beranda adalah halaman muka yang berisi fitur-fitur yang ditawarkan oleh Ensiklopedia Sastra Indonesia versi daring. Daftar isi adalah

halaman yang berisi susunan nama pengarang yang disusun secara alfabetis yang menggambarkan konten ensiklopedia. Fitur Penyusun berisi nama-nama yang terlibat dalam pengembangan ensiklopedia. Fitur Tentang berisi sambutan dari pimpinan serta sekilas informasi tentang Ensiklopedia Sastra Indonesia.



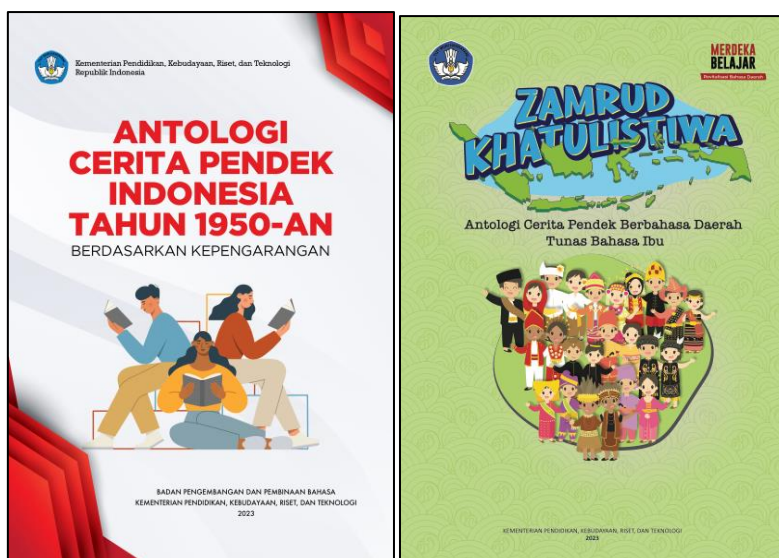
Gambar 2.17 Sampul Bahan Pengayaan Ensiklopedia Sastra Indonesia



Gambar 2.18 Tampilan Ensklopedi Sastra Indonesia

Aplikasi Ensiklopedia Indonesia <https://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/>

Sementara itu, dua bahan pengembangan sastra lain di luar konten aplikasi Ensiklopedia Indonesia yang dikembangkan Pusbanglin adalah kumpulan (antologi) cerita pendek berdasarkan kepengarangan era 1950-an sebagai bagian dari penyusunan sejarah sastra Indonesia, serta antologi cerita pendek berbahasa daerah karya anak Indonesia. Kedua produk pengembangan sastra tersebut akan disebarluaskan kepada khalayak sebagai bahan pengayaan khazanah sastra Indonesia.



Gambar 2.19 Sampul Bahan Pengayaan Pengembangan Sastra

Antologi cerita pendek (cerpen) Indonesia ini berisi puluhan cerpen dari berbagai majalah di tahun 50-an. Misalnya cerpen “Tiga Manusia” yang berasal dari majalah Zenit yang terbit pada 1954; cerpen “Selingan Bahagia” dari majalah Liberal yang terbit pada 1957 dan masih banyak judul lainnya di masa rentang tersebut. Kumpulan cerpen tersebut menjadi bukti sejarah perjalanan karya sastra telah ada dan terpublikasi di masa itu sehingga dengan penyusunannya bermanfaat untuk diperkenalkan bagi generasi saat ini.

Pada 2023 juga dihasilkan cerpen oleh generasi muda, bahkan oleh tunas muda berasal dari 9 provinsi yang mewakili 30 bahasa daerah. Sebanyak 73 peserta itu telah menghasilkan 80 cerpen yang telah dikurasi oleh para sastrawan bahasa daerah masing-masing yang tertuang dalam kumpulan antologi cerpen berbahasa daerah. Karena dihasilkan oleh tunas bahasa ibu dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia, antologi cerpen berbahasa daerah karya mereka ini layak disebut sebagai “zamrud khatulistiwa”.

3) Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra

Komunitas sastra dalam satu dasawarsa terakhir ini tumbuh sangat pesat. Pesatnya pertumbuhan komunitas sastra itu diikuti oleh adanya penciptaan karya sastra yang juga produktif. Karya sastra dengan berbagai kearifan lokal yang diproduksi sastrawan dari berbagai komunitas sastra tersebut sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa. Keberadaan komunitas sastra sebagai wadah para sastrawan untuk saling asah asih asuh dan produksi karya sastra dari para sastrawan bagaikan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keberadaan komunitas sastra ini perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah agar dapat mengoptimalkan

perannya sebagai tempat dan media kreatif bagi sastrawan dan pegiat sastra dalam memproduksi karya sastra atau menyelenggarakan kegiatan kesastraan.

Di samping itu juga, perlu adanya penghargaan bagi para pelaku/pegiat sastra yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menggerakkan, membangun, dan mencipta karya sastra. Pemerintah perlu membantu para pelaku/pegiat sastra sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan kesastraan yang telah dilakukannya. Tentu saja, apresiasi ini juga menjadi pemantik pemerintah daerah, lembaga, atau masyarakat setempat untuk dapat lebih menghargai pelaku/pegiat sastra yang ada di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2023 menginisiasi rintisan penyaluran Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra (selanjutnya disingkat dengan Bantuan).

Tujuan pemberian Bantuan, adalah sebagai berikut.

1. Bantuan fasilitasi diberikan dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas sastra, meningkatkan peran komunitas sastra sebagai sarana pembelajaran sastra, membantu pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan bidang kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong jumlah, mutu, serta penyebaran dan publikasi karya sastra.
2. Bantuan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas sastra atau perseorangan atas kinerjanya yang luar biasa dalam aktivitas kesastraan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kesastraan.

Fasilitasi adalah bantuan yang ditujukan untuk membantu komunitas sastra dalam mengoptimalkan kegiatan kesastraan yang diselenggarakan oleh komunitas sastra tersebut. Penghargaan adalah bantuan yang bertujuan sebagai apresiasi terhadap perseorangan atau komunitas sastra yang memiliki kinerja yang luar biasa dalam memberi dampak positif kepada masyarakat serta memberi kontribusi kesastraan bagi pemberdayaan masyarakat.



Gambar 2.20 Gambaran singkat Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra 2023

Program Bantuan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang terbuka dan transparan, yaitu

- 1) tahap pengumuman dan seleksi yang diunggah pada laman Badan Bahasa serta portal Spirit Pusbanglin;
- 2) tahap seleksi berkas, baik administratif maupun substantif;
- 3) tahap penilaian substansi dan anggaran oleh dewan juri;
- 4) tahap pengumuman;
- 5) tahap pembekalan;
- 6) pelaksanaan kegiatan Bantuan;
- 7) pendampingan, monitoring dan evaluasi; dan
- 8) pelaporan.

Program Bantuan tersebut diberikan sebanyak 79 paket dengan rincian penerima tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Daftar Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023

No.	Penerima Bantuan	Jenis Bantuan
1.	Akademi Bangku Panjang Mingguraya	Bantuan Fasilitasi
2.	Forum Lingkar Pena, Jawa Barat	Bantuan Fasilitasi

3.	Forum Penulis Bacaan Anak	Bantuan Fasilitas
4.	Kampung Seni Tegal	Bantuan Fasilitas
5.	Keluarga Studi Sastra Tiga Gunung	Bantuan Fasilitas
6.	Klub Baca Petra	Bantuan Fasilitas
7.	Komunitas Dongeng Dakocan	Bantuan Fasilitas
8.	Komunitas Gemulun Indonesia	Bantuan Fasilitas
9.	Komunitas Jangkah Nusantara	Bantuan Fasilitas
10.	Komunitas Masyarakat Lumpur	Bantuan Fasilitas
11.	Komunitas Ngejah	Bantuan Fasilitas
12.	Komunitas Seni Lobo	Bantuan Fasilitas
13.	Lampung Literature	Bantuan Fasilitas
14.	Padepokan Kirik Nguyuh	Bantuan Fasilitas
15.	Pelangi Sastra Malang	Bantuan Fasilitas
16.	Perkumpulan Seni Nusantara Baca	Bantuan Fasilitas
17.	PlakPlik Ngataku	Bantuan Fasilitas
18.	Pustaka Kabanti	Bantuan Fasilitas
19.	Ruang Rupa Metamorfosa	Bantuan Fasilitas
20.	Rumah Baca dan Kreativitas Tanah Ombak	Bantuan Fasilitas
21.	Rumah Kreatif Sahabat Nusantara	Bantuan Fasilitas
22.	Rumah Kreatif Suku Seni Kampar	Bantuan Fasilitas
23.	Teater Satu Lampung	Bantuan Fasilitas
24.	Yayasan Babahsa Mombasa	Bantuan Fasilitas
25.	Yayasan Bintang Sekorong Muda	Bantuan Fasilitas
26.	Yayasan Cita Cerita Anak	Bantuan Fasilitas
27.	Yayasan Forum Komunitas Kreatif Sibolga	Bantuan Fasilitas
28.	Yayasan Ruang Baca Komunitas	Bantuan Fasilitas
29.	Yayasan Indonesia Buku	Bantuan Fasilitas
30.	Komunitas Mahima	Bantuan Fasilitas
31.	Perkumpulan Sabda Bunian	Bantuan Fasilitas
32.	Yayasan 17000 Pulau Imaji	Bantuan Fasilitas
33.	Srawung Sastra	Bantuan Fasilitas
34.	Rumah Kreatif Wadas Kelir	Bantuan Fasilitas
35.	Yayasan Gang Sebelah	Bantuan Fasilitas

36.	Yayasan Az Zahra Kepahiang	Bantuan Fasilitas
37.	Dbuku Bakti Bangsa	Bantuan Fasilitas
38.	Komunitas Riau Sastra	Bantuan Fasilitas
39.	Rumah Kata Sorong	Bantuan Fasilitas
40.	Langau Etnika Kalbar	Bantuan Fasilitas
41.	Buol Educare Institute	Bantuan Fasilitas
42.	Lentera Muda Kerinci	Bantuan Fasilitas
43.	Sanggar Seni Budaya Batin Penghulu	Bantuan Fasilitas
44.	PKBM Mitra Bakti Edukasi	Bantuan Fasilitas
45.	Limbo Wolio Institute	Bantuan Fasilitas
46.	Komunitas Sastra Dusun Flobamora	Bantuan Penghargaan Komunitas
47.	Pamarsudi Sastra Jawi	Bantuan Penghargaan Komunitas
48.	Yayasan Triwida	Bantuan Penghargaan Komunitas
49.	Yayasan Pakem Maddhu	Bantuan Penghargaan Komunitas
50.	Sanggar Seni dan Budaya Pesaja	Bantuan Penghargaan Komunitas
51.	Fatih Muftih	Bantuan Penghargaan Perseorangan
52.	Latief Setia Nugraha	Bantuan Penghargaan Perseorangan
53.	Eddy Mulyadi	Bantuan Penghargaan Perseorangan
54.	Supali Kasim	Bantuan Penghargaan Perseorangan
55.	Sri Setyowati	Bantuan Penghargaan Perseorangan
56.	Deni Rachman	Bantuan Penghargaan Perseorangan
57.	Faris Al Faisal	Bantuan Penghargaan Perseorangan
58.	Ahmad Fauzam	Bantuan Penghargaan Perseorangan
59.	Heri Condro Santoso	Bantuan Penghargaan Perseorangan
60.	I Putu Wahyu Wirayuda	Bantuan Penghargaan Perseorangan
61.	Wicahyanti Rejeki	Bantuan Penghargaan Perseorangan
62.	Angela Corine	Bantuan Penghargaan Perseorangan
63.	Abdul Aziz	Bantuan Penghargaan Perseorangan
64.	Destriyadi	Bantuan Penghargaan Perseorangan
65.	Ihsan Subhan	Bantuan Penghargaan Perseorangan
66.	Darwin Susianto	Bantuan Penghargaan Perseorangan
67.	S. Ahmad Assagaf	Bantuan Penghargaan Perseorangan
68.	Ndaru Murdopo	Bantuan Penghargaan Perseorangan

69.	Fitri Susilowati	Bantuan Penghargaan Perseorangan
70.	Askolani	Bantuan Penghargaan Perseorangan
71.	Tia Setiadi	Bantuan Penghargaan Perseorangan
72.	Isbedy Stiawan ZS	Bantuan Penghargaan Perseorangan
73.	Indah Darmastuti	Bantuan Penghargaan Perseorangan
74.	Tri Astoto	Bantuan Penghargaan Perseorangan
75.	Bambang Kariyawan Ys	Bantuan Penghargaan Perseorangan
76.	Yoan Sutrisna Nugraha	Bantuan Penghargaan Perseorangan
77.	Fitri Restiana	Bantuan Penghargaan Perseorangan
78.	Mirawati	Bantuan Penghargaan Perseorangan
79.	Afrizal Cik	Bantuan Penghargaan Perseorangan

Bentuk Pemberian Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra antara lain:

- 1) Bantuan Fasilitasi Komunitas, bentuk bantuannya berupa uang yang disesuaikan dengan penilaian rencana anggaran biaya kegiatan (RAB).
- 2) Bantuan Penghargaan Komunitas/Perorangan, bentuk bantuannya berupa uang dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00.



Gambar 2.21 Kegiatan Komunitas Sastra Penerima Bantuan Fasilitasi

Selama program Bantuan berjalan, para penerima Bantuan mendapatkan sejumlah pembekalan tentang pertanggungjawaban kegiatan serta laporan kegiatan. Selain pembekalan, Tim Pusbanglin juga memberikan pemantauan dan pendampingan kepada komunitas, baik secara daring dan luring. Komunitas penerima Bantuan dapat melakukan koordinasi, konsultasi, serta diskusi dengan Tim Pusbanglin melalui kanal aplikasi yang disediakan.



Gambar 2.22 Kegiatan Konsinyasi Evaluasi dan Pelaporan Penerima Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kerja tahun 2023, antara lain:

1. Tingginya komitmen dan kerja sama tim dalam pelaksanaan program pada KKLP Kamus dan Peristilahan. Upaya mitigasi risiko juga terus dijalankan sehingga kendala dapat tertangani dengan baik. Hasilnya, target indikator kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melebihi jumlah yang diharapkan.
2. Pembuatan produk pemodernan sastra berhasil dilaksanakan sesuai rencana salah satunya dipengaruhi oleh kolaborasi yang baik antara Pusbanglin (BPP Bahasa) dengan Ainaki, Asprodi, dan Mitrasdudi.
3. Komitmen yang kuat dari tim pemodernan sastra KKLP Pelindungan dan Pemodernan untuk melaksanakan pembuatan produk pemodernan sastra sampai selesai.
4. Dukungan dari pimpinan satker yang mendukung pelaksanaan pembuatan produk pemodernan sastra dari awal hingga selesai

Dalam perjalanan penyusunan produk pengembangan tersebut, tidak terlepas dari hambatan. Hambatan yang dibarengi dengan strategi penyelesaian dalam pembuatan produk pengembangan bahasa dan sastra dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Hambatan, Strategi Penyelesaian dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Belum tersedia SDM dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai untuk menduduki posisi pengelola dan pengembang aplikasi-aplikasi kebahasaan seperti KBBI Daring, KBBI Luring, Sipebi, Koin, Acuan Kebahasaan, dan Pasti.	Pengajuan permintaan SDM dengan kualifikasi pengembang aplikasi	Mencari pengembang lepas yang memiliki kemampuan dalam pembuatan sistem aplikasi (sudah dilakukan).
Latar belakang pendidikan bahasa yang dimiliki oleh tim masih belum sesuai kebutuhan, misalnya saat ini belum ada staf yang berlatar belakang pendidikan bahasa Belanda, Persia, Portugis, dsb.	Pengajuan permintaan SDM yang ahli etimologi bahasa-bahasa tertentu.	Bekerja sama dengan ahli bahasa yang mumpuni dalam penyusunan kamus etimologi (sudah dilakukan).
Sebagai tim pengembangan bahasa dengan pekerjaan berbasis teknologi, saat ini belum didukung oleh perangkat komputer dengan spesifikasi yang sangat tidak memadai sehingga waktu bekerja menjadi tidak efisien	Pengajuan pengadaan perangkat computer baru yang memadai.	Pemeriksaan dan penambahan kapasitas komputer untuk meningkatkan performa (belum dilakukan).
Anggaran yang tidak sepadan dengan tagihan produk dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan	Diskusi secara intensif dengan para pakar, praktisi, satuan pendidikan, dan mitrasDudi untuk bekerja sama melalui swakelola dalam pembuatan produk yang sesuai secara kualitas dan kuantitas	Melakukan pembahasan internal secara intensif dalam merencanakan rencana kegiatan yang akan dilakukan
Kurangnya komitmen semua pihak, baik pengelola maupun pengembang, untuk menyelesaikan produk tepat waktu	Memperkuat komunikasi berkelanjutan dan kolaborasi semua pihak agar tetap menjaga komitmen dalam penyelesaian pembuatan produk secara tepat waktu	Melakukan pembahasan terkait kontrak kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak

Penetapan penentuan tipe swakelola menyita waktu. Pekerjaan substansi oleh tim pelaksana belum dapat dilakukan jika penentuan tipe swakelolanya belum jelas	Melakukan konsultasi intensif dengan Itjen, LKPP, dan Biro Umum PBJ	Melakukan penjadwalan kegiatan dari awal tahun agar tidak lagi ada keterlambatan
Dokumen kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan berubah-ubah	Menyusun dokumen kontrak oleh pejabat pengadaan dan PPK, sedangkan tim kerja menyediakan data dan dokumen lain yang dibutuhkan	Melakukan diskusi serius dalam menentukan isi dari dokumen kontrak yang akan digunakan dengan mengundang para pakar
Banyaknya jumlah berkas dokumen swakelola membuat penyusunan dokumen memakan waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh kepada proses pembayaran	Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen swakelola dan menjadi mediator tim eksternal untuk menjelaskan perkembangan penyusunan dokumen dan pembayaran	Melakukan pembahasan dengan intensif terkait jumlah berkas yang diperlukan dan saling mengingatkan agar tidak ada keterlambatan pengurusan dokumen
Beberapa praktisi dan studio terkendala dalam proses produksi karena permasalahan anggaran, sementara tim tersebut telah menyampaikan laporan progress kegiatan sesuai tenggat	Berkoordinasi dengan tim keuangan untuk mendapat Solusi atas permasalahan tersebut	Perlu diadakan diskusi awal secara mendetail mengenai program kerja dan kontrak kerja yang akan digunakan

Produk-produk pengembangan bahasa dan sastra berperan penting sebagai penyedia informasi, ilmu pengetahuan, serta rujukan. Melalui pemanfaatan produk kodifikasi, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami teks serta memproduksi teks sesuai bidang ilmu mereka. Kamus, tesaurus, ensiklopedia, dan korpus bahasa dapat menjadi media informasi yang dapat membantu masyarakat menambah kosakata dan pengetahuan yang mereka punya sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterbacaan mereka akan suatu teks. Peningkatan pemahaman dan keterbacaan akan suatu teks ditambah dengan pemanfaatan pedoman kebahasaan akan mampu meningkatkan produksi teks di masyarakat.

Melalui Kamus Bidang Ilmu, diharapkan para guru dan siswa di mana pun berada dapat saling berkomunikasi dalam istilah yang sama. Keseragaman istilah tersebut dimaksudkan untuk mencapai saling keterpahaman yang lebih tinggi di kalangan para pemangku kepentingan yang

bergelut di bidang-bidang ilmu tertentu. Sudah lama dicita-citakan bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang dapat dengan jelas dan tepat mengemukakan makna-makna secara ilmiah. Penyusunan kamus bidang ilmu merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui Kamus Etimologi, masyarakat dapat melacak etimologi suatu kata, yakni asal-usul serta perubahan bentuk dan makna suatu kata. Dengan demikian masyarakat tidak hanya dapat mengetahui makna sebuah kata, tetapi juga asal-usulnya sehingga dapat menambahkan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam terhadap kata maupun bahasa.

Melalui Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia (SIPEBI), ketersediaan bahan kebahasaan, di samping kamus, yang dapat digunakan secara praktis dan dapat dijangkau secara luas oleh pengguna bahasa Indonesia dapat terpenuhi. Bahan yang dimaksud berupa alat atau aplikasi yang dapat membantu pengguna bahasa untuk mengecek kesalahan berbahasa Indonesia, terutama dalam ragam tulis. Sebagai sebuah aplikasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemutakhiran SIPEBI perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja aplikasi menjadi lebih akurat dan ramah pengguna serta pangkalan data yang semakin komprehensif. Dengan adanya pemutakhiran ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan publik terhadap produk kebahasaan.

Acuan Kebahasaan diharapkan dapat menjadi sumber tambahan pengetahuan dan memberi gagasan ilmiah bagi masyarakat yang menekuni bidang kebahasaan, khususnya kodifikasi bahasa, pendokumentasian kosakata, penyusunan kamus, serta pepadanan istilah..

Melalui produk film animasi selain berdampak pada tersedianya produk pengembangan sastra tentunya terdapat juga manfaat yang mengiringinya, diantaranya:

1. masyarakat dapat mengetahui cerita rakyat (legenda) yang ada di seluruh Indonesia dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap sastra Indonesia terutama cerita-cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,
2. membentuk kolaborasi yang baik antara BPP Bahasa dengan unit utama Kemendikbudristek (Mitrasdudi), Asprodi, dan dunia industri (AINAKI).

2. Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pelindungan dan Pemodernan telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka pelindungan bahasa dan sastra sebagai upaya untuk mempertahankan dan melindungi bahasa dan sastra agar tetap dipergunakan oleh masyarakat pemiliknya. Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki peran untuk menyusun model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini akan dijadikan acuan oleh balai dan kantor bahasa sebagai pelaksana pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki target sasaran sebanyak 6 model pelindungan yang terbagi menjadi 3 model pelindungan bahasa dan 3 model pelindungan sastra.

Partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah mencerminkan peningkatan kesadaran terhadap identitas budaya yang dimiliki. Masyarakat mulai mengenali pentingnya bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari identitas lokal dan keberlanjutan warisan budaya melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah. Meningkatnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari penyelenggaraan kegiatan kreatif dan budaya yang menampilkan bahasa dan sastra, seperti festival tunas bahasa ibu. Sebagai salah satu tahapan dari Revitalisasi Bahasa Daerah, festival tunas bahasa ibu menjadi salah satu wadah bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif serta merangsang minat, bakat, dan kreativitas masyarakat dalam penggunaan bahasa daerah.

Dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan bahasa dan sastra daerah, masyarakat menunjukkan minat dan cinta terhadap kekayaan bahasa dan sastra daerah. Hal ini dapat mendorong generasi muda untuk menghargai dan mewarisi bahasa dan sastra daerah ke generasi berikutnya. Peningkatan partisipasi masyarakat juga berjalan seiring dengan kerja sama antara komunitas lokal, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga pendukung kebudayaan. Kolaborasi ini memperkuat upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah secara holistik. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah langkah penting menuju pelestarian kekayaan budaya dan identitas lokal. Ini juga menciptakan momentum untuk mengembangkan inisiatif bersama yang dapat mewujudkan keberlanjutan bahasa dan sastra daerah.

1.1. Indikator Kinerja Kegiatan II.I

Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 2.7 Target dan Realisasi IKK Jumlah Model Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	Tahun 2023			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	2.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	6	6	7	117%	20	13	65%

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai acuan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah. Model pelindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan pelindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model pelindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalian potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksaraan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra. Model pelindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Metode penghitungan indikator kinerja jumlah model pelindungan bahasa dan sastra adalah dengan menjumlahkan model-model pelindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu. Pada tahun 2023 indikator jumlah model pelindungan bahasa dan sastra di dukung oleh kegiatan dari RO(Rincian *Output*) model pelindungan bahasa dan model pelindungan sastra.

Realisasi IKK jumlah model pelindungan bahasa dan sastra 2023 melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 6 model telah terealisasi sebanyak 7 model dengan persentase capaian sebesar 117%. Model-model yang telah tersusun yaitu:

1. Pedoman Digitalisasi Pemetaan Bahasa.
2. Petunjuk teknis model Pengukuran Daya Hidup Bahasa (VIBA)
3. Petunjuk teknis model Registrasi Bahasa Daerah
4. Petunjuk teknis model Bimbingan Teknis Pengajar Utama Revitalisasi Bahasa Daerah

5. Pedoman Model pemetaan sastra
6. Model pedoman vitalitas sastra
7. Penyusunan model konservasi sastra lisan

Pada tahun awal renstra, indikator model perlindungan bahasa dan sastra belum memiliki nomenklatur dan merealisasikan target BPP Bahasa yaitu jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah yang kritis dan terancam punah dan jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah yang kritis dan terancam punah. Indikator Kinerja Kegiatan model perlindungan bahasa dan sastra baru di munculkan pada revisi Renstra BPP Bahasa 2020—2024. Indikator ini terdiri dari model yang berupa pedoman yang dihasilkan pada kegiatan model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra. Pada tahun 2021 jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah yang kritis dan terancam punah memiliki target 500 orang dan terealisasi sebanyak 600 orang atau 120% tercapai melebihi target. Untuk jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah yang kritis dan terancam punah memiliki target sebanyak 500 orang, namun hanya dapat terealisasi sebanyak 300 orang atau hanya 60% dari target terealisasi. Dalam mengidentifikasi capaian dan indikator keberhasilan dari Pusbanglin khususnya KKLK Pelindungan dan Pemodernan indikator jumlah penutur muda kurang tepat, indikator ini lebih tepat berada di balai/kantor bahasa. Supaya sasaran kegiatan dan indikator kinerja dapat lebih tepat dan sesuai maka Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengusulkan perubahan Renstra BPP Bahasa 2020—2024..

Target akhir renstra revisi 2020—2024 untuk jumlah model perlindungan bahasa dan sastra adalah sebanyak 20 model. Sampai dengan tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 7 model perlindungan bahasa dan sastra.

Dalam merealisasikan target indikator kinerja jumlah model perlindungan bahasa dan sastra KKLK Pelindungan dan Pemodernan melakukan tugas dan fungsinya dengan dipayungi oleh rincian *output* model perlindungan bahasa dan model perlindungan sastra.

❖ Model Pelindungan Bahasa

Pelindungan bahasa merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan keberlanjutan, pemeliharaan, dan pengembangan sebuah bahasa agar tidak punah. Upaya pelindungan bahasa dilakukan untuk melestarikan kekayaan budaya, identitas etnis, dan pengetahuan, serta kearifan lokal yang terkandung dalam suatu bahasa daerah. Fenomena kehilangan bahasa atau punahnya suatu bahasa dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti globalisasi, migrasi, dan dominasi bahasa-bahasa besar. Upaya mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan bahasa daerah dilandasi pada pemahaman warisan budaya yang harus selalu

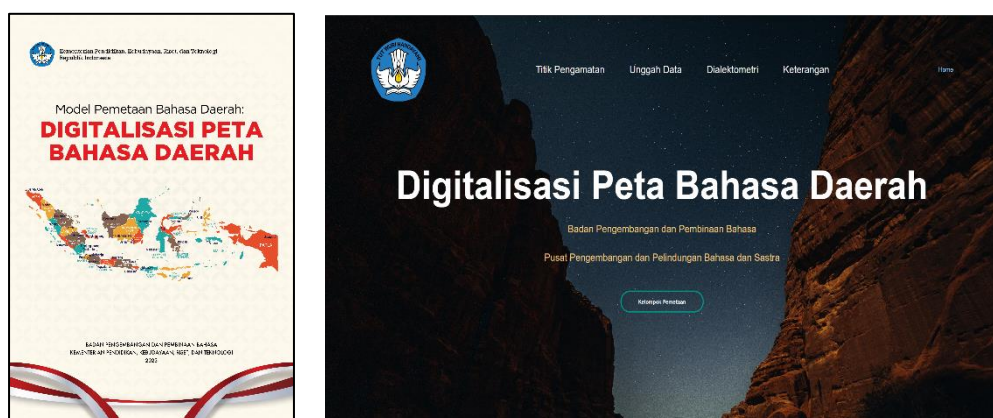
dijaga. Punahnya sebuah bahasa dan sastra menggambarkan hilangnya jati diri warisan budaya yang tersimpan.

Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) menjadi salah satu program prioritas perlindungan bahasa daerah sebagai upaya untuk menambah penutur muda dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan bahasa daerah. Kegiatan revitalisasi bahasa daerah merupakan langkah strategis untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah percakapan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, revitalisasi bahasa daerah juga dapat menjadi ajang promosi bahasa daerah serta menumbuhkan kebanggaan pemilik bahasa terhadap bahasa daerahnya.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyusun model perlindungan bahasa. Model perlindungan bahasa merupakan pedoman/wadah aktivitas bagi penyelenggara, mitra, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perlindungan bahasa daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun 2023, sebanyak tiga model perlindungan bahasa telah tersusun, yaitu 1) model digitalisasi pemetaan bahasa, 2) model pengukuran daya hidup bahasa, 3) model registrasi bahasa. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan atau wadah bagi unit pelaksana teknis (UPT) di balai/kantor bahasa dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan bahasa daerah.

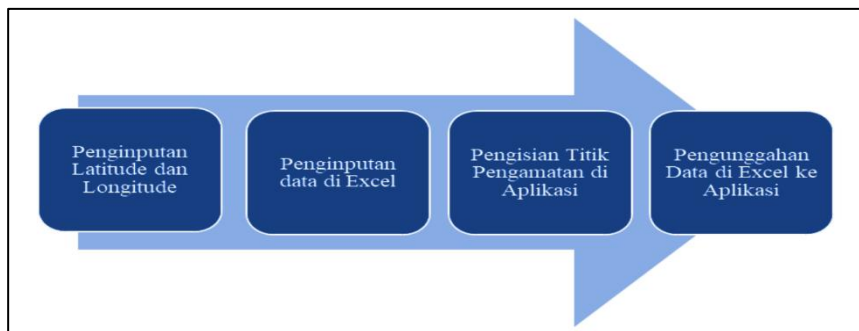
1. Digitalisasi Pemetaan Bahasa

Digitalisasi pemetaan bahasa merujuk pada pemanfaatan teknologi digital dan perangkat lunak untuk membuat, menyimpan, dan memvisualisasikan peta bahasa secara elektronik. Pendigitalan ini melibatkan pengentrian/pengunggahan data bahasa, analisis, representasi data bahasa dalam bentuk digital, dan penentuan status bahasa/dialek melalui penghitungan dialektometri melalui penggunaan teknologi informasi.



Gambar 2.23 Sampul dan Tampilan Digitisasi Peta Bahasa Daerah

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang terdiri atas lima modul, yaitu *home web page*, titik pengamatan, unggah data, dialektometri, dan keterangan. Modul titik pengamatan digunakan untuk memasukkan kode provinsi, kode kabupaten/kota, nama bahasa daerah, *latitude*, dan *longitude*; modul unggah data untuk memasukkan data bahasa yang tercatat pada *software excel*; dan modul dialektometri digunakan untuk mengolah data bahasa daerah untuk melihat perbandingan bahasa daerah di satu titik pengamatan dengan titik pengamatan lainnya. Pada tahun 2023, pengembangan aplikasi digitalisasi pemetaan bahasa yang dilakukan adalah penginputan data *latitude/longitude* dan pengunggahan data bahasa dengan alur seperti berikut.

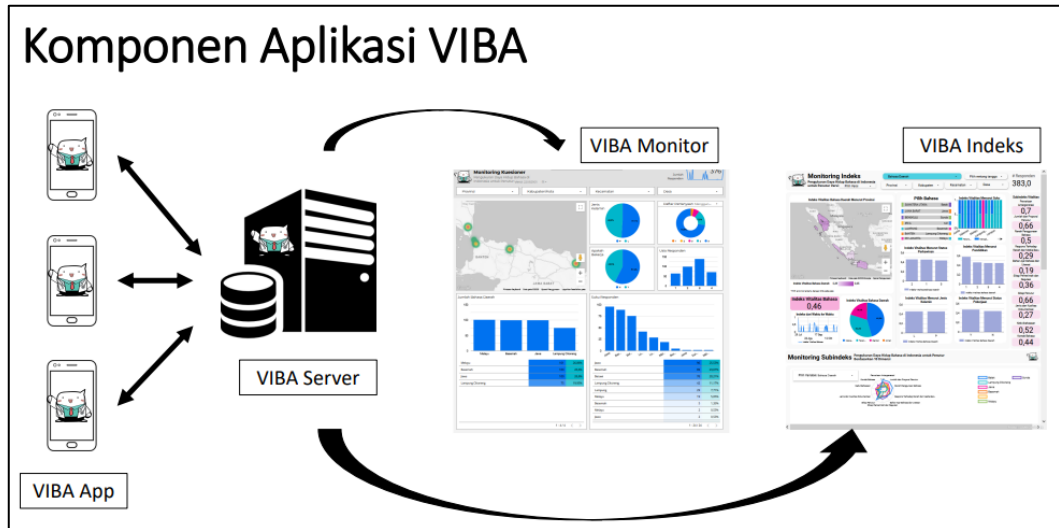


Gambar 2.24 Alur penginputan *Latitude* dan *Longitude*

Digitalisasi pemetaan bahasa memberikan manfaat untuk 1) memahami keberagaman bahasa daerah, 2) mengelola, melestarikan, dan menyimpan data bahasa daerah sebagai warisan linguistik, serta 3) mengembangkan dan merekomendasikan kebijakan nasional berbasis data bahasa daerah.

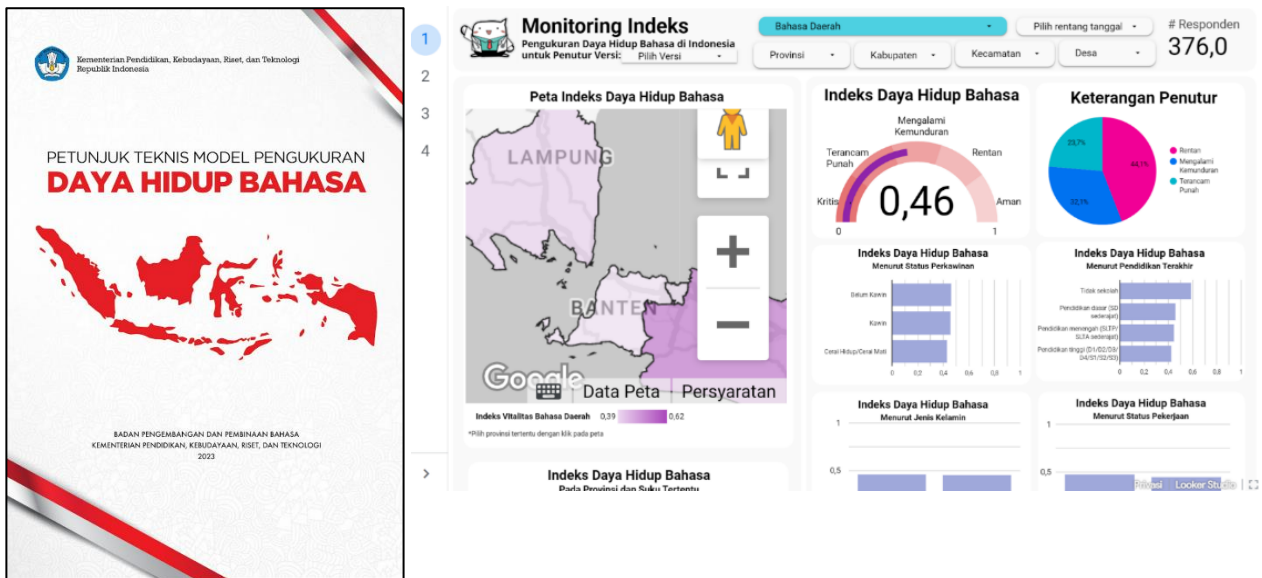
2. Pengukuran Daya Hidup Bahasa (VIBA)

Pengukuran Daya Hidup Bahasa yang juga dikenal sebagai pengukuran vitalitas bahasa (VIBA) merujuk pada serangkaian kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai keberlanjutan dan keberlanjutan sebuah bahasa. Pengukuran ini dilakukan dengan metode penghitungan indeks melalui aplikasi VIBA. VIBA adalah platform aplikasi CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) yang merupakan modernisasi atau digitalisasi pengumpulan data (*data collection*) dengan menggunakan komputer. Terdapat empat komponen aplikasi VIBA, yaitu (1) VIBA App, (2) VIBA Server, (3) VIBA Monitoring, dan (4) VIBA Indeks seperti gambar berikut.



Gambar 2.25 Komponen Aplikasi VIBA

VIBA App adalah aplikasi VIBA berbasis Android untuk mengumpulkan data daya hidup bahasa. VIBA Server merupakan tempat untuk mengunduh, mengunggah, dan menyimpan data kuesioner dari VIBA App yang telah terisi. VIBA Monitoring digunakan untuk memantau pendataan lapangan dan VIBA Indeks merupakan aplikasi monitoring indeks berbasis Web yang digunakan untuk memantau angka indeks dari bahasa yang didata.



Gambar 2.26 Sampul Petunjuk Teknis Model Pengukuran Biaya Hidup Bahasa dan Tampilannya

Pengukuran daya hidup bahasa secara komputerisasi ini bermanfaat dalam mengidentifikasi bahasa-bahasa yang menghadapi risiko kepunahan dan menjadi dasar untuk merancang strategi pelestarian bahasa. Selain itu, data yang diperoleh dari pengukuran ini dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman bahasa daerah di Indonesia.

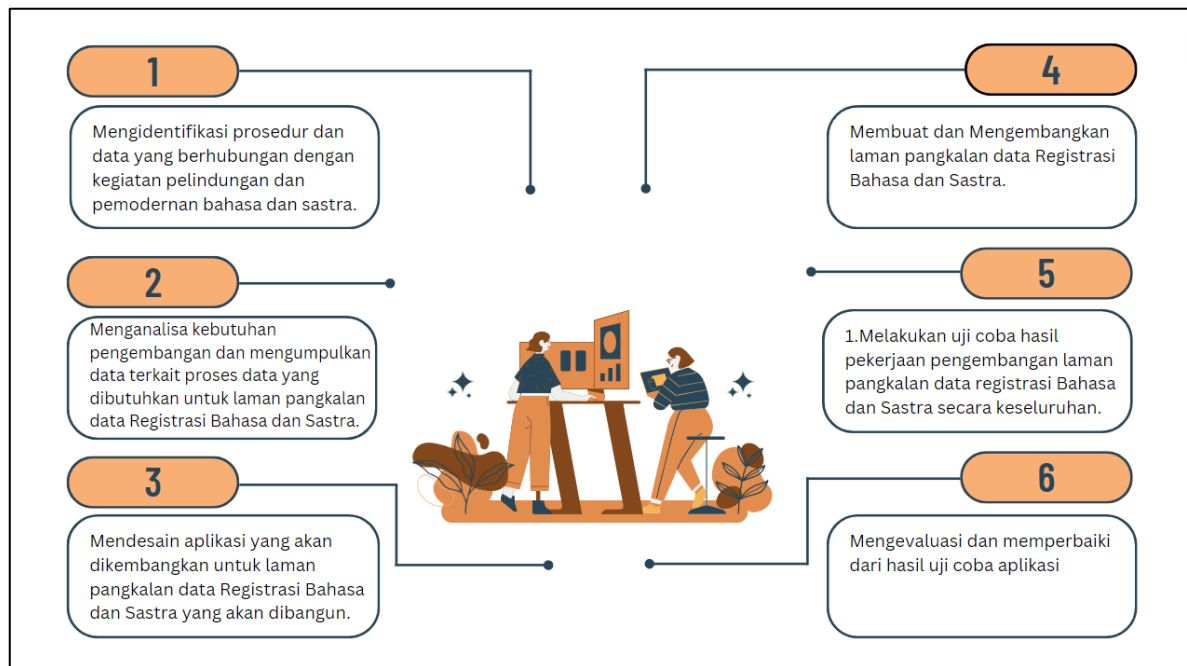
3. Registrasi Bahasa Daerah

Registrasi Bahasa Daerah merupakan salah satu proses penginputan data bahasa daerah melalui aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan. Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan (Regbastra) adalah aplikasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangkalan data hasil perlindungan bahasa daerah di balai dan kantor bahasa. Aplikasi ini dapat diakses pada tautan <https://regbahasasastra.kemdikbud.go.id/linmod>. Terdapat lima fitur utama pada aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan.



Gambar 2.257Fitur Utama Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan

Sebagai aplikasi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendataan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra daerah, pengembangan aplikasi pangkalan data Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan memiliki ruang lingkup berikut ini.

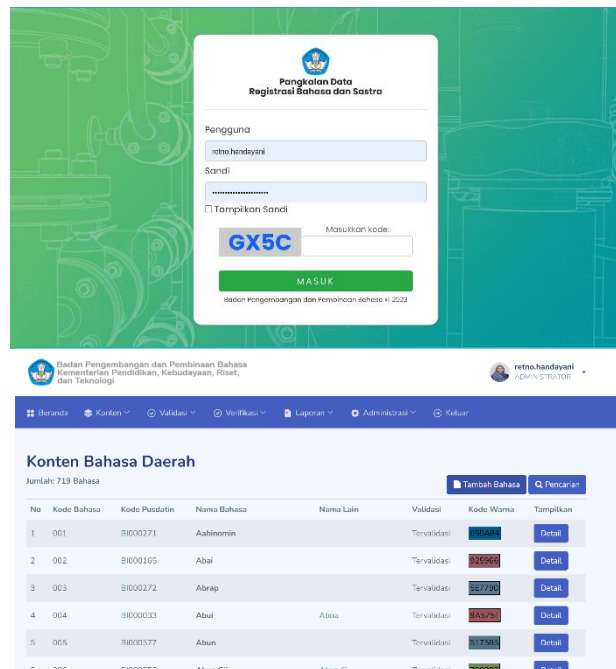
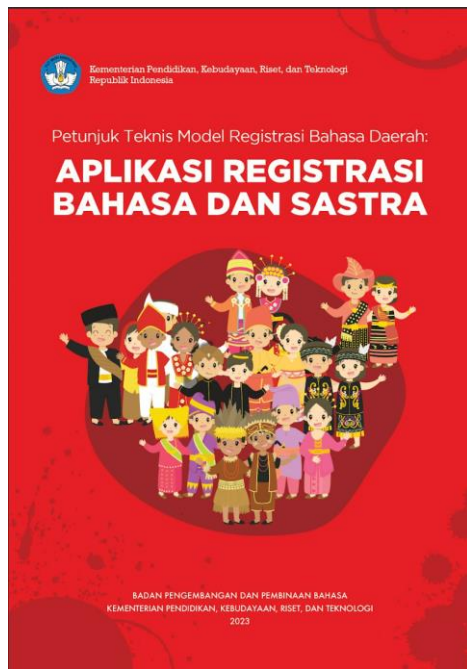


Gambar 2.28 Alur pemutakhiran Aplikasi

Pada tahun 2023, dilakukan pengembangan dan perbaikan beberapa fitur untuk mengakomodasi kebutuhan pendataan perlindungan bahasa dan sastra daerah, yaitu

- a. perbaikan fitur dan perubahan struktur menu bahasa daerah;
- b. perbaikan konten untuk penginputan data sastra lisan, sastra cetak, dan manuskrip;
- c. penambahan rekap data Revitalisasi Bahasa Daerah;
- d. penambahan Fitur Kemah Cerpen;
- e. penambahan *Open Access* Revitalisasi Bahasa Daerah; dan
- f. publikasi data Revitalisasi Bahasa Daerah di Dapobas.

Selain pengembangan dan perbaikan fitur tersebut, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga menyusun dan menyiapkan petunjuk teknis Registrasi Bahasa Daerah sebagai panduan bagi balai/kantor bahasa dalam penginputan data yang berkaitan dengan bahasa daerah dan upaya pelindungannya, termasuk Revitalisasi Bahasa Daerah.



Gambar 2.29 Sampul Petunjuk Teknis Model Registrasi Bahasa Daerah dan Tampilan Aplikasinya

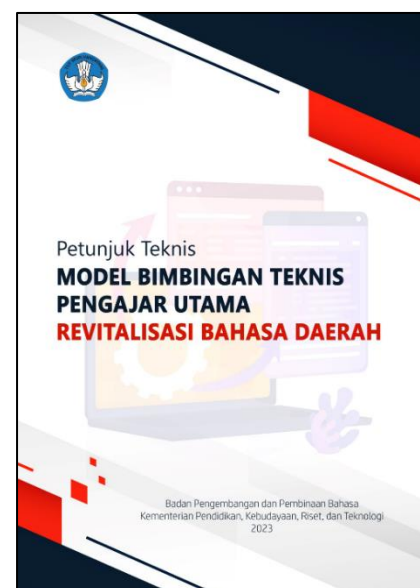
Keberhasilan tiga model perlindungan bahasa yang tersusun pada tahun 2023 dapat dilihat dari faktor-faktor, yaitu



Gambar 2.30 Faktor Pendukung Keberhasilan pembuatan Tiga model Pelindungan Bahasa

4. Model Bimbingan Teknis Pengajar Utama Revitalisasi Bahasa Daerah

Pada 2023 juga dihasilkan model yang merupakan capaian tambahan output Pelindungan Bahasa, yaitu Model Bimbingan Teknis Pengajar Utama Revitalisasi Bahasa Daerah. Model ini berupa petunjuk teknis yang memberikan gambaran pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan pengajar utama atau guru master, serta penjelasan tahap tugas lanjutan, di antaranya materi bimbingan teknis serta tugas pengimbasan (diseminasi) yang diharapkan dilakukan oleh guru utama tersebut kepada guru/rekan sejawat. Dengan demikian akan dihasilkan guru lain yang memiliki kesamaan misi untuk melestarikan bahasa daerah, terlebih untuk diteruskan kepada peserta didik.



Gambar 2.31 Sampul Petunjuk Teknis Model Bimbingan Teknis Pengajar Utama

2. Model Pelindungan Sastra

Model pelindungan sastra yang disusun pada 2023 sebanding dengan jumlah model pelindungan bahasa, yakni sebanyak 3 model, antara lain model pemetaan sastra, model vitalitas sastra, dan model konservasi sastra lisan.

- a. **Model pemetaan sastra** diperlukan untuk memetakan keanekaragaman sastra yang ada di Indonesia, baik bentuk/ragam maupun jenisnya; memetakan distribusi variasi sastra berdasarkan wilayah sebaran bahasa; dan memetakan lokasi dan persebaran sastra di wilayah Indonesia.
- b. **Model pedoman vitalitas sastra** disusun untuk menghasilkan langkah kerja dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pelindungan sastra. Penyusunan pedoman vitalitas sastra ini diperlukan guna mengetahui daya hidup sebuah sastra lisan yang ada di daerah. Selain itu, untuk menetapkan aturan dan tata kerja pelaksana baik pusat maupun daerah sehingga hasilnya sesuai dengan program pelindungan sastra.
- c. **Penyusunan model konservasi sastra lisan** dimaksudkan untuk melengkapi penyusunan petunjuk teknis yang telah disusun sebelumnya agar pelaksana teknis lebih memahami alur kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan. Selain itu, pedoman yang akan disusun juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.



Gambar 2.32 Sampul Model Pelindungan Sastra

Untuk menghasilkan model yang ideal diperlukan uji coba model ke sejumlah wilayah. Sastra lisan Angklung Buncis. Sebagai salah satu contoh hasil uji coba yang mencakup 3 model pelindungan sastra. Pemetaan sastra: angklung buncis berasal dari daerah Cianjur dan belum terpetakan. Vitalitas sastra: statusnya terancam punah karena tidak ada pewarisan kepada generasi muda.



Gambar 2.33 Aksi Maestro Sastra Lisan Angklung Buncis sebagai Upaya Konservasi Sastra

Adapun hambatan dan strategi penyelesaian dalam penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8 Hambatan, Strategi Penyelesaian dan Langkah Antisipasi

Hambatan	Strategi Pencapaian	Langkah Antisipasi
Setiap data utama (bahasa daerah, sastra lisan, sastra cetak, manuskrip, dan komunitas sastra memiliki komponen dan struktur data yang kompleks dan beragam	Melakukan pembahasan bersama dengan pakar terkait pemrosesan data yang sudah didapat	Membahas dan berdiskusi dengan pakar dan tim secara rutin untuk merumuskan struktur pendataan dengan cermat
Pengembangan menu pada model perlindungan bahasa sering berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemangku kepentingan sehingga berdampak pada perubahan menu dan fitur aplikasi	Melakukan pembahasan secara berkala untuk menyatukan keputusan yang tepat	Melakukan survei dan menyusun standar data berdasarkan hasil survei dengan pakar dapat mengantisipasi kebutuhan data yang berubah-ubah.
Data peta bahasa belum semua tersimpan dalam aplikasi	Melibatkan balai dan kantor bahasa untuk memetakan data pada aplikasi yang disediakan	Melacak dan mencocokkan data pada aplikasi dan kuesioner fisik, baik yang berada di Pusat maupun balai dan kantor bahasa
Titik pengamatan dan wilayah tutur bahasa belum sesuai wilayah administrasi terbaru	Melibatkan balai dan kantor untuk memutakhirkan data terbaru terkait titik pengamatan dan wilayah tutur bahasa	Memutakhirkan titik pengamatan dengan wilayah administrasi berdasarkan peraturan terbaru melalui kerja sama dengan pihak terkait

Dalam menyusun sebuah rekomendasi untuk penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra, diperlukan perhatian pada sejumlah aspek mengenai luaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*), serta ukuran kinerja bagi setiap aspek tersebut. Dalam hal hasil (*outcome*) dapat dilihat pada capaian jangka menengah seperti berikut ini.

1. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
2. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dari komunitas bahasa itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
3. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor swasta dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
4. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan media dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah;
5. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah, serta
6. Tersedianya data dan informasi mengenai dukungan sektor pendidikan dalam mengembangkan ekosistem bahasa dan sastra daerah.

3. Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat memengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *new public management*, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *new public service (governance)* yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa.

Hasil yang diharapkan dari penciptaan tata kelola yang baik melalui reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut yaitu dengan cara peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran.

3.1. Indikator Kinerja Kegiatan III.I

Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2.9 Tabel Target dan Realisasi IKK Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	Tahun 2022			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1 Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB	BB	A	113%	BB	A	120%

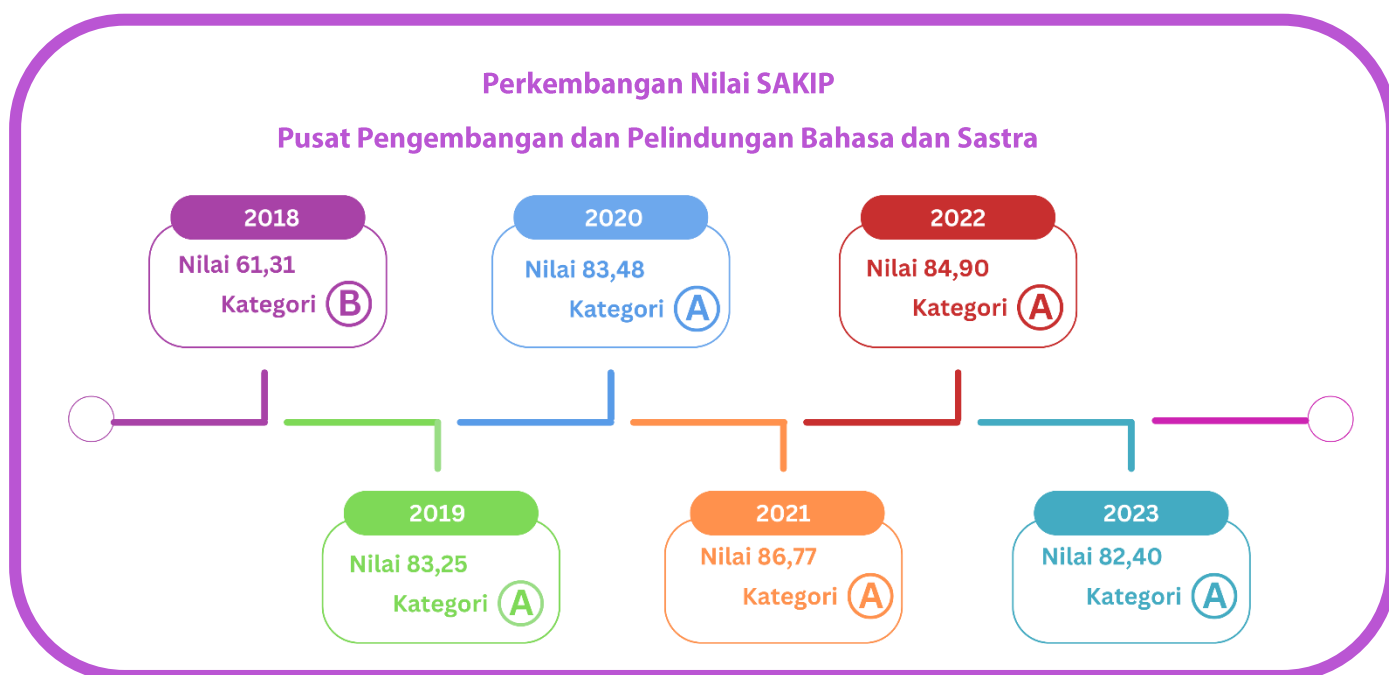
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Target nilai SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dapat tercapai, bahkan melampaui target. Ketercapaian nilai/predikat SAKIP ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

1. Pembahasan draf revisi Renstra Badan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan memperhatikan permasalahan pada Renstra terdahulu serta penyederhanaan sasaran dan indikator sesuai dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
2. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
3. Penyusunan perjanjian kinerja Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kasubbag Tata Usaha, dan koordinator KKLK;
4. Tindak lanjut Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya;
5. Penyusunan SOP pelaporan kinerja dan SOP penyusunan laporan kinerja disertai dengan kegiatan sosialisasi beserta implementasinya;
6. Pengukuran kinerja yang dilakukan, baik setiap bulan maupun triwulan; dan
7. Penyusunan laporan kinerja.



Gambar 2.34 Perkembangan Nilai SAKIP
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Hal-hal yang menjadi kendala dalam ketercapaian predikat SAKIP, yaitu kurangnya pemahaman dan perhatian akan pentingnya implementasi SAKIP sebagai instrument evaluasi pada suatu instansi, dan pemahaman subyektif auditor terkait butir evaluasi pada saat penilaian SAKIP.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan beberapa langkah antisipatif, yang meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi, baik di lingkungan internal maupun koordinasi

dengan pihak eksternal, seperti Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Biro Perencanaan, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran, dan instansi terkait lainnya. Keikutsertaan staf dalam bimbingan SAKIP yang dilakukan oleh Pusdiklat dan Biro Perencanaan Kemdikbud pun menjadi salah satu upaya dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut. Selain itu, upaya sosialisasi mengenai pentingnya implementasi SAKIP pun dilakukan kepada internal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra. Di samping itu, pengisian dokumen SAKIP dalam aplikasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal diupayakan agar dapat diisi sesuai periode waktu pengisiannya pada laman SPASIKITA Kemdikbudristek.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target predikat SAKIP satker yaitu:

1. mengevaluasi kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra secara holistik dan komprehensif setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan.
2. melakukan sosialisasi dan implementasi SAKIP kepada seluruh pegawai dan pimpinan di Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
3. melengkapi butir-butir penilaian SAKIP sesuai dengan peraturan terbaru; dan
4. membentuk tim penyusunan SAKIP.

3.2. Indikator Kinerja Kegiatan III.II

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tabel 2.10 Tabel Target dan Realisasi IKK Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA/KL Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

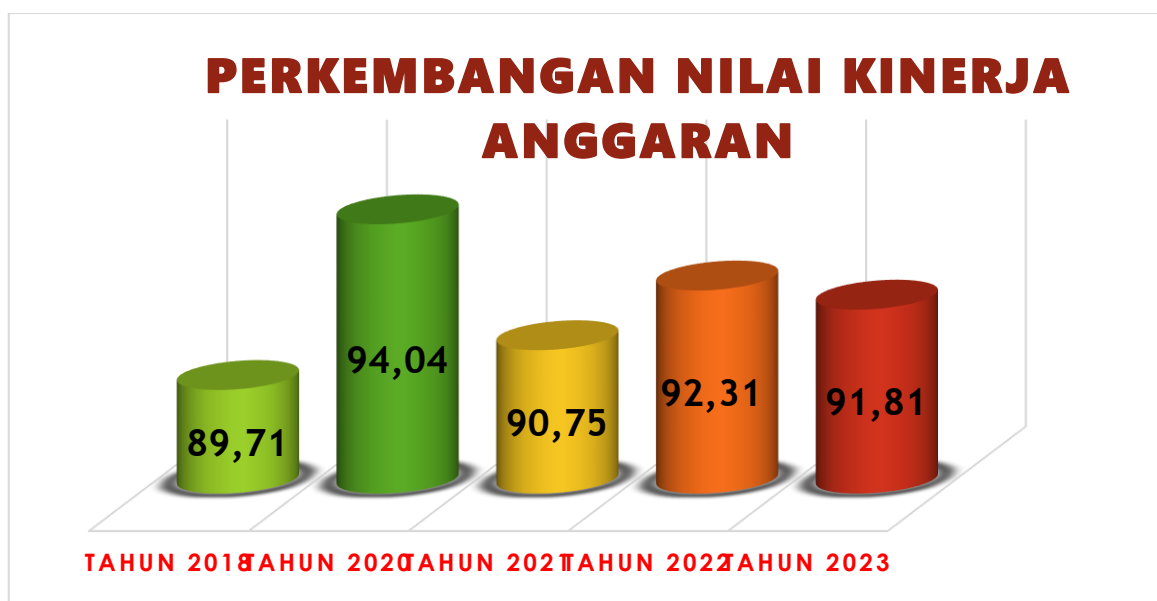
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022	Tahun 2022			Renstra		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3 Meningkatkan tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	92,31	91	91,81	101%	91	92,81	101%

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Dalam menghitung nilai kinerja anggaran menggunakan metode penghitungan sebagai berikut: $NKA = \text{Nilai EKA [50\%]} + \text{Nilai IKPA [50\%]}$

Dimana nilai EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) terdiri atas: penyerapan anggaran, konsistensi, capaian *output*, efisiensi, dan nilai efisiensi sedangkan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) terdiri atas:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran(revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA).
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran(penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM).
3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran(capaian *output*).



Grafik 2.1 Tabel Perkembangan Nilai Kinerja Anggaran

Hambatan dan permasalahan yang memengaruhi tercapainya target nilai kinerja anggaran yaitu:

1. Jadwal yang tidak proporsional dan inkonsistensi pelaksanaan jadwal kegiatan oleh tim; dan
2. Kegiatan dan realisasi anggaran baru terealisasi seluruhnya pada akhir tahun.

Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan cara:

1. Mengevaluasi dan mengatur ulang sisa jadwal kegiatan dan peneguran terhadap coordinator kegiatan oleh pimpinan;
2. Pimpinan telah menegur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar realisasi *output* berjalan sesuai rencana dan tidak menumpuk di akhir tahun.

Strategi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam meningkatkan pencapaian target kinerja nilai kinerja anggaran yaitu:

1. Meminimalkan deviasi rencana penarikan anggaran dengan memantapkan jadwal pelaksanaan kegiatan serta penyiapan tim keuangan yang tangguh;
2. Penguatan tata kelola keuangan terkait pertanggung jawaban keuangan yang tertib dan lancar disertai dengan peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan; dan
3. Pemetaan kegiatan yang menyeluruh dalam rangka menyiapkan data yang valid dan handal bagi pimpinan dalam menentukan/mengambil kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan/anggaran.

REALISASI ANGGARAN

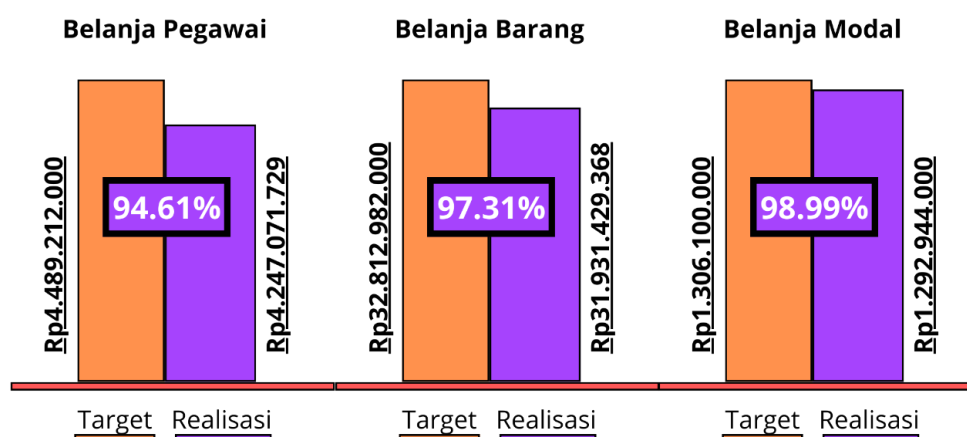
1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam DIPA awal tahun 2023 adalah sebesar 38.884.294.000,00. Pusbanglin mengalami satu kali revisi pagu, hingga pagu anggaran terakhir menjadi 38.608.294.000,00.



Gambar 2.35 Perkembangan DIPA Tahun Anggaran 2023

Dari pagu anggaran terakhir tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp37.417.445.097,00 (data SP2D SAKTI) dengan persentase daya serap sebesar 97.06%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian tiga sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Grafik 2.2 Tabel Realisasi Per Jenis Belanja

Tabel 2.11 Tabel Penyerapan Anggaran Setiap IKK

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Daya Serap
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	1.1	[[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	21.972.359.000	21.369.844.8437	97,26%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	2.1	[[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	7.392.020.000	7.308.340.820	98,87%
3	Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	3.1	[[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	7.937.815.000	7.500.315.840	94,49%
		3.2	[[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1.306.100.000	1.292.944.000	98,99%

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 14,54% atau Rp5.613.645.948,00 dari pagu anggaran sebesar Rp38.608.294.000,00 Hasil efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari:

- Optimalisasi kegiatan pemerikayaan kosakata, Integrasi Produk Kosakata dengan TIK, penyusunan rekomendasi kebijakan perlindungan bahasa dan sastra, dan penyusunan bahan pengembangan sastra dengan sisa anggaran yang ada untuk mencapai target yang telah ditentukan;
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas, meeting dan pembayaran jasa pada kegiatan pemodernan sastra, dan Penyusunan Pedoman Kebahasaan sehingga dapat menghasilkan produk pengembangan bahasa dan sastra yang dapat melebihi target.
- Strategi pelaksanaan kegiatan dengan melalui penggabungan beberapa kegiatan yang memiliki konsep, tema, dan narasumber yang sama

Efisiensi berdampak pada meningkatnya capaian indikator kinerja satker rata-rata 113% yang melebihi dari target yang ditetapkan terutama pada Indikator Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra (122%) dan indikator Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah (117%).

Berikut adalah ringkasan dari empat IKK yang memiliki capaian melebihi target. Dengan memaksimalkan strategi/inovasi yang sudah tersebut diatas Pusbanglin mampu mengoptimalkan keterbatasan anggaran untuk merealisasikan target melebihi dari target capaian yang sudah ditentukan.

Tabel 2.12 Tabel Realisasi dan Anggaran Setiap IKK

No.	Indikator Kinerja kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi	Volume target	Realisasi
1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	21.972.359.000	21.972.359.000	21.369.844.8437	41	50
2	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	7.392.020.000	7.392.020.000	7.308.340.820	6	7
3	Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	8.123.815.000	7.937.815.000	7.500.315.840	BB	A
4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	1.306.100.000	1.306.100.000	1.292.944.000	91	91,81

INOVASI, PENGHARGAAN, DAN PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melakukan inovasi sebagai berikut.

A. Kamus Masuk Sekolah (KMS)

Tahun 2023, Tim Perkamusan dan Peristilahan berhasil melaksanakan tahapan uji coba Kamus Masuk Sekolah. Kegiatan ini merupakan program baru yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan kemahiran merujuk (*reference skill*) kepada siswa, mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah. Tahapan uji coba ini dilaksanakan secara tatap muka di enam sekolah di Jakarta, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang sekolah menengah atas, di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Sentul, Kabupaten Bogor, dan di Kalimantan Selatan.



Gambar 2.36 Kegiatan Kamus Masuk Sekolah

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah pengenalan produk-produk leksikografi seperti kamus, tesaurus, glosarium, dan ensiklopedia, baik cetak maupun daring. Siswa juga dilatih untuk mencari makna dalam kamus cetak dengan cepat dan sistematis. Untuk tingkat sekolah menengah atas/kejuruan, materi ditambah dengan pembuatan akun pengguna terdaftar KBBI Daring. Pembelajaran dilaksanakan baik melalui teori maupun praktik, dengan kegiatan kelas yang menarik.

II. Kata Tahun Ini

Menjelang akhir tahun 2023, Tim Perkamus dan Peristilahkan menyiapkan bahan pemilihan Kata Tahun ini (KTI). Sejak tahun 2019 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan satu kata yang populer dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan KTI. KTI yang telah ditetapkan sebelumnya adalah milenial (2019), pandemi (2020), vaksin (2021), dan metamesta (2022). Penetapan KTI didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu daftar kata terpopuler menurut KBBI, frekuensi kemunculan di Google Trends, penanda berbagai peristiwa, penggunaan kata itu di berbagai kalangan, dan keluasan distribusi kata tersebut.

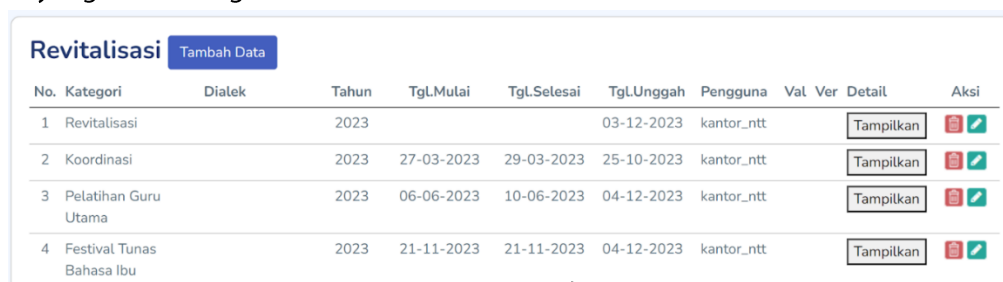


Gambar 2.37 Artikel Terkait Kata Tahun Ini 2023

Tahun ini, Badan Bahasa menetapkan kata kecerdasan buatan sebagai KTI tahun 2023. Kecerdasan buatan memiliki sinonim kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial merupakan padanan dari *artificial intelligence*. Menurut KBBI, kecerdasan buatan adalah program komputer dalam meniru manusia, seperti mengambil Keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Kata kecerdasan buatan banyak digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang meluncurkan produk berbasis kecerdasan artifisial untuk masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian lebih masyarakat adalah ChatGPT. ChatGPT adalah program komputer yang dapat merespons pertanyaan dan menyediakan jawaban layaknya manusia

III. Pendataan Revitalisasi Bahasa Daerah Berbasis Web

Seluruh tahapan kegiatan Revitalisasi yang dilakukan oleh balai dan kantor bahasa memuat data yang berharga sehingga perlu disediakan suatu pangkalan data. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengembangkan aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan untuk dapat menyediakan pangkalan data yang terintegrasi. Salah satu fitur yang dikembangkan adalah fitur Revitalisasi.

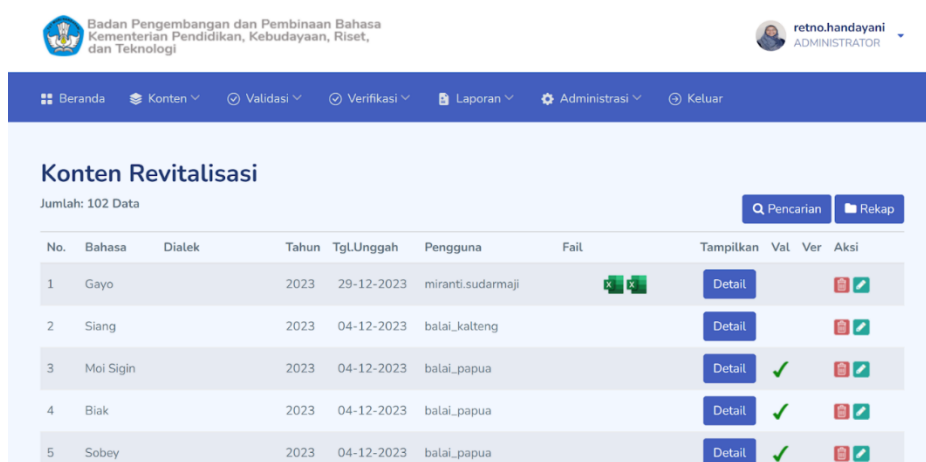


No.	Kategori	Dialek	Tahun	Tgl.Mulai	Tgl.Sesuai	Tgl.Unggah	Pengguna	Val	Ver	Detail	Aksi
1	Revitalisasi		2023			03-12-2023	kantor_ntt			Tampilkan	[Edit] [Hapus]
2	Koordinasi		2023	27-03-2023	29-03-2023	25-10-2023	kantor_ntt			Tampilkan	[Edit] [Hapus]
3	Pelatihan Guru Utama		2023	06-06-2023	10-06-2023	04-12-2023	kantor_ntt			Tampilkan	[Edit] [Hapus]
4	Festival Tunas Bahasa Ibu		2023	21-11-2023	21-11-2023	04-12-2023	kantor_ntt			Tampilkan	[Edit] [Hapus]

Gambar 2.38 Tampilan fitur Revitalisasi

Fitur Revitalisasi ini dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilaksanakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan RBD disediakan menu inputan dalam fitur Revitalisasi tersebut. Sebelumnya data kegiatan RBD tersimpan secara partial di setiap balai dan kantor bahasa pada perangkat masing-masing yang rentan hilang. Akan tetapi, dengan adanya aplikasi ini, balai dan kantor bahasa dapat menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah di wilayah kerja masing-masing.

Pengembangan fitur ini juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan UPT sebagai pelaksana kegiatan. Pendataan Revitalisasi Bahasa Daerah ini dapat memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat dan capaian program Revitalisasi Bahasa Daerah oleh seluruh balai/kantor bahasa dalam upaya pelindungan bahasa daerah.



No.	Bahasa	Dialek	Tahun	Tgl.Unggah	Pengguna	Fail	Tampilkan	Val	Ver	Aksi
1	Gayo		2023	29-12-2023	miranti.sudarmaji	[Gagal] [Berhasil]	Detail			[Edit] [Hapus]
2	Siang		2023	04-12-2023	balai_kalteng		Detail			[Edit] [Hapus]
3	Moi Sigin		2023	04-12-2023	balai_papua		Detail	✓		[Edit] [Hapus]
4	Biak		2023	04-12-2023	balai_papua		Detail	✓		[Edit] [Hapus]
5	Sobey		2023	04-12-2023	balai_papua		Detail	✓		[Edit] [Hapus]

Gambar 2.39 Tampilan fitur konten Revitalisasi

Seluruh komponen dan unsur partisipan yang terlibat Revitalisasi Bahasa Daerah diinput dan disimpan pada aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan sebagai bukti keberhasilan dan capaian program tersebut. Data yang terinput terintegrasi ke laman Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan (Dapobas) sebagai tempat satu data kebahasaan dan kesastraan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini adalah capaian partisipasi masyarakat terhadap program RBD tahun 2023 yang terhimpun melalui aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan dan tersaji pada laman Dapobas pada tautan <https://dapobas.kemdikbud.go.id/homecat.php?show=url/rbd&cat=21>.

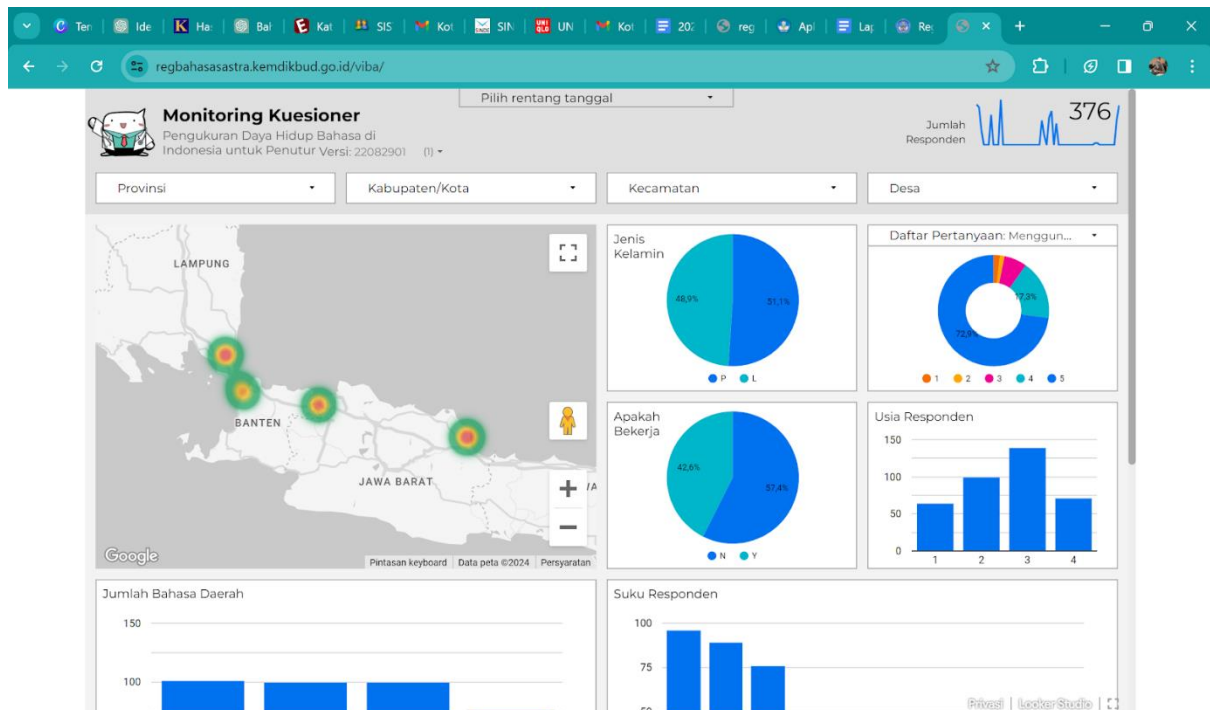
Data Revitalisasi Bahasa Daerah		
Semua Tahun	Semua Provinsi	Tampilkan
Tahun	Semua Tahun	
Provinsi	Semua Provinsi	
	<u>Sekolah/Komunitas</u>	
	Jumlah Sekolah SD	20.676 Sekolah
	Jumlah Sekolah SMP	10.199 Sekolah
	Jumlah Komunitas	546 Komunitas
	<u>Partisipan</u>	
	Guru utama	13.982 Orang
	Guru terimbas/sejawat	103.793 Orang
	Siswa	4.270.477 Orang
	Pengawas	159 Orang
	Kepala sekolah	1.893 Orang
	Pegiat bahasa-sastra/budayawan/seniman	3.684 Orang
	Perwakilan pemerintah daerah	1.742 Orang
	Perwakilan dinas pendidikan/kebudayaan	200 Orang
	Perwakilan BUMN/BUMD/Swasta	24 Orang
	Fasilitator/dosen/akademisi	69 Orang
	Ahli bahasa sastra	55 Orang
	Duta bahasa	398 Orang
	Komunitas sastra/penggerak literasi	15.425 Orang
	Penampil FTBI	15.698 Orang
	Penonton FTBI	670.998 Orang
	Tim Penggerak PKK	41 Orang
	Masyarakat umum	146.061 Orang
	TOTAL	5.244.699 Orang

Gambar 2.40 Data Revitalisasi Bahasa Daerah

Data tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa melalui program Revitalisasi Bahasa Daerah. Data ini akan bertambah sesuai inputan data oleh pelaksana RBD di balai/kantor bahasa dan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan untuk merancang strategi pelindungan bahasa di wilayah masing-masing. Dengan adanya menu Revitalisasi pada Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan ini, seluruh data yang berkaitan dengan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah dapat tersimpan dan terpusat dalam satu aplikasi pangkalan data.

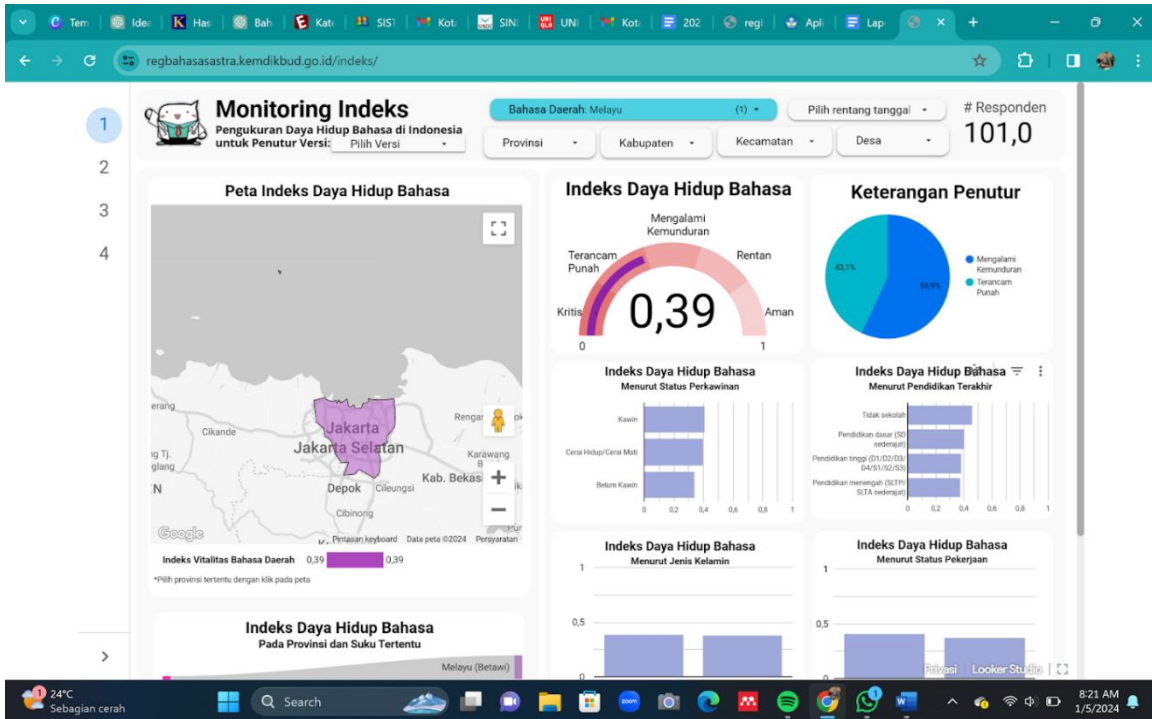
IV. Laman VIBA Monitoring dan VIBA Indeks

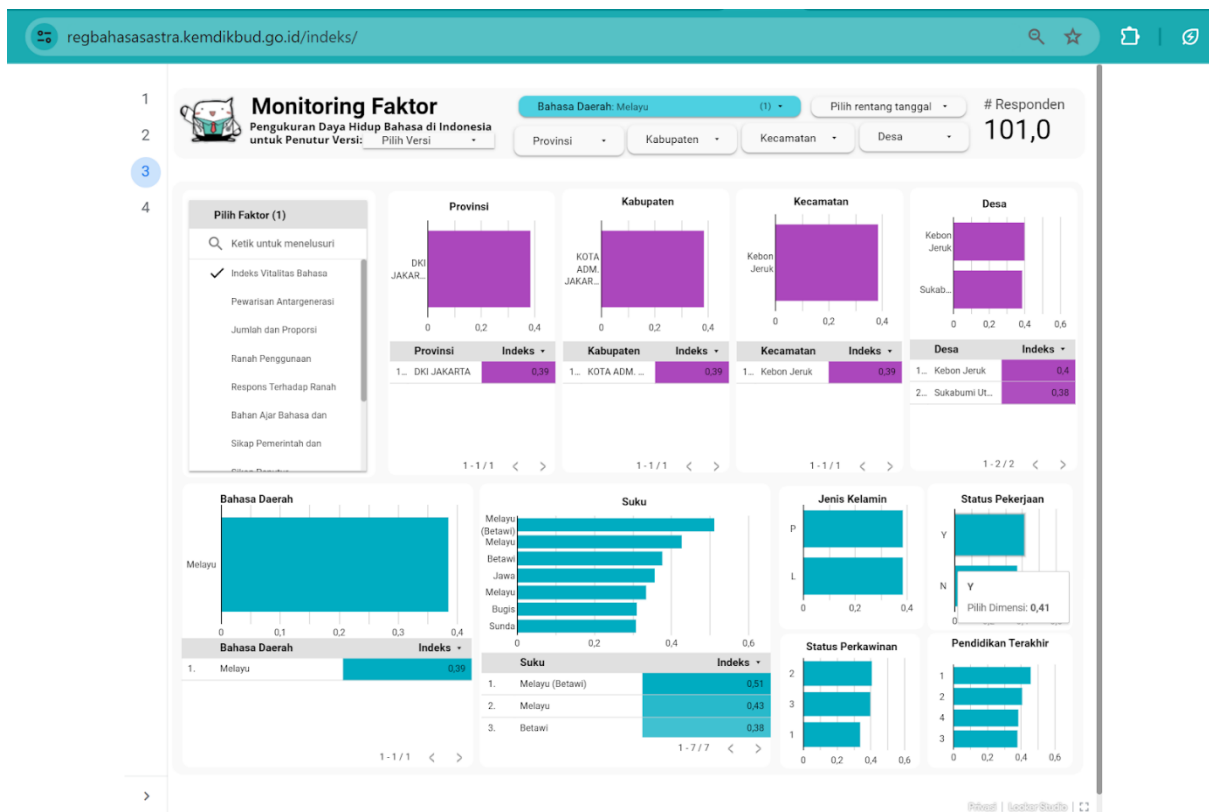
Setelah VIBA App sebagai aplikasi pengumpulan data daya hidup bahasa dibuat pada tahun 2022, tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengembangkan fitur lanjutan, yaitu VIBA Monitoring dan VIBA Indeks. VIBA Monitoring merupakan aplikasi *dashboard* monitoring pendataan lapangan yang digunakan oleh manajemen untuk memantau jalannya pendataan lapangan. VIBA Monitoring dapat diakses melalui tautan <https://regbahasasastra.kemdikbud.go.id/viba/>



Gambar 2.41 Tampilan Viba Monitoring Kuesioner

VIBA Indeks merupakan aplikasi *dashboard* monitoring indeks sementara yang digunakan oleh manajemen untuk memantau angka indeks dari bahasa yang didata. VIBA Indeks menampilkan data indeks daya hidup bahasa subindeks daya hidup bahasa berdasarkan sepuluh faktor vitalitas bahasa dan variabel data. dan VIBA Indeks dapat diakses melalui tautan <https://regbahasasastra.kemdikbud.go.id/indeks/>.





Gambar 2.42 Tampilan Viba Monitoring

Dengan adanya VIBA Monitoring, pemantauan atau monitoring terhadap data daya hidup bahasa dapat dilakukan. Selain itu, data pengukuran daya hidup bahasa ditampilkan secara langsung pada laman tersebut. Seluruh kuesioner yang terisi melalui VIBA App akan termonitor datanya pada VIBA Monitoring ini sehingga apabila terdapat data/kuesioner yang belum terkirim pada VIBA App, data Daerah tersebut akan terlihat pada VIBA Monitoring. Sementara itu, VIBA Indeks dapat memperlihatkan indeks daya hidup bahasa daerah secara simultan dan terperinci dari data kuesioner yang terkirim ke VIBA Server.

V. Pemodernan Karya Sastra melalui Film Animasi

Pemodernan sastra melalui pengalihwahanan merupakan proses mengadaptasi karya sastra, seperti cerita rakyat, legenda, novel, ke dalam medium film animasi. Film animasi memberikan kebebasan ekspresi visual yang luar biasa. Pengalihwahanan sastra ke dalam animasi memungkinkan pemroduksi film untuk mengeksplorasi imajinasi dan menyampaikan elemen-elemen naratif melalui gambar-gambar yang kreatif dan artistik.



Gambar 2.43 Tampilan Hasil Film Animasi

Animasi dapat menyajikan dunia fiksi, seperti karakter dan elemen fiksi lain menjadi lebih bebas dan menarik. Animasi memungkinkan penggambaran karakter yang kuat secara visual. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan desain karakter dapat membawa karakter sastra menjadi hidup. Animasi juga membantu menyoroti pesan utama dan tema yang terdapat dalam karya sastra. Penggunaan elemen visual dapat menguatkan dan memperjelas makna-makna yang terkandung dalam cerita asli. Pengalihwahan sastra ke dalam animasi menghasilkan inovasi dalam narasi visual. Film animasi memiliki daya tarik universal untuk semua usia. Dengan mengalihwahanakan sastra ke dalam animasi, kisah-kisah yang sebelumnya hanya diakses melalui teks/buku bacaan dapat diakses dalam bentuk audiovisual. Selain itu, kisah yang ditujukan untuk pembaca anak-anak atau remaja tersebut dapat menarik perhatian audiens lintas usia.

Penghargaan

Pada tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berhasil emndptkan penghargaan internal dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2023



Gambar 2.44 Piagam Penghargaan ZI-WBK Internal

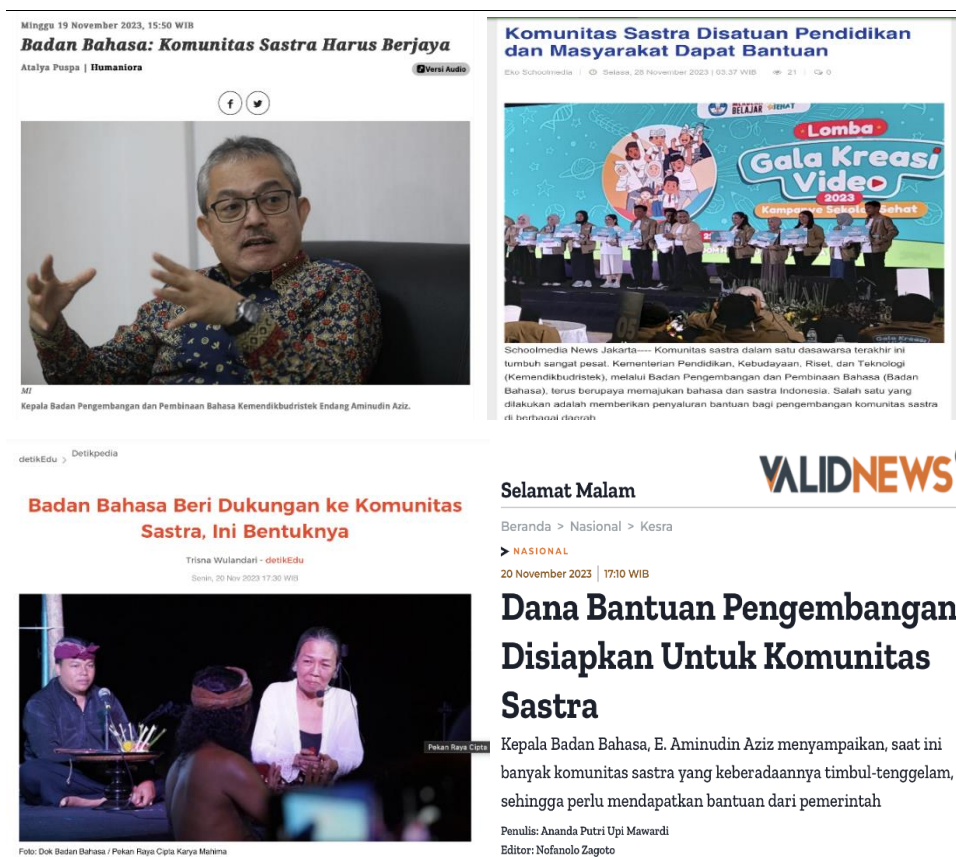
Program Kolaborasi/Collaborative

Program kolaborasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2023 dalam hal pelindungan bahasa dan pemodernan sastra adalah Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Sastra, Pembuatan Film Animasi pada program Produk Pengembangan Sastra serta Digitalisasi Pemetaan Bahasa dan Pengukuran Daya Hidup Bahasa pada Model Pelindungan Bahasa.

A. Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan: Penguatan Komunitas Sastra

Komunitas sastra di Indonesia tumbuh pesat melalui penciptaan karya sastranya yang adiluhung. Namun, tidak sedikit dari komunitas sastra itu masih berkembang dan belum mapan, timbul tenggelam, tidak menentu sehingga eksistensinya perlu mendapatkan perhatian serius.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dilaksanakan oleh Pusbanglin sebagai pusat substansi pelaksana kegiatan telah menginisiasi rintisan Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan kepada 50 komunitas sastra serta 29 sastrawan atas kinerjanya dalam pemajuan aktivitas kesastraan mendukung program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta pemberdayaan masyarakat dan ekosistem kesastraan Indonesia pada tahun anggaran 2023. Program ini merupakan program perdana Pusbanglin dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada komunitas dan perseorangan yang produktif berkarya dalam dunia kesastraan.



Gambar 2.45 Artikel Terkait Bantuan Pemerintah

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah tersebut sebagai berikut.

1. Bantuan fasilitasi diberikan dalam rangka mendorong berkembangnya komunitas sastra, meningkatkan peran komunitas sastra sebagai sarana pembelajaran sastra, membantu pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan bidang kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra, serta mendorong jumlah, mutu, serta penyebaran dan publikasi karya sastra.
2. Bantuan penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada komunitas sastra atau perseorangan atas kinerjanya yang luar biasa dalam aktivitas kesastraan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem kesastraan.

Kiprah dan hasil kegiatan komunitas sastra tersebut terjadi dalam rangkuman video kegiatan pada tautan berikut.

https://drive.google.com/drive/folders/1yAKY46lxVLsxFjyhsGOXw_YRwhsTxgyC

Para komunitas sastra penerima Bantuan juga berkesempatan menampilkan hasil kegiatan selama menerima Bantuan kepada masyarakat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Berikut tampilan dokumentasi kegiatan pentas karya komunitas tersebut.



Gambar 2.46 Kegiatan Pentas Karya Komunitas Sastra

B. Pembuatan Produk Film Animasi

Dalam pembuatan produk film animasi pada tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berkolaborasi dengan pihak-pihak sebagai berikut.

1. AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia)

AINAKI selaku pihak yang bergerak dalam dunia industri animasi berperan sebagai tim pakar yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembuatan 33 produk film animasi yang dikerjakan oleh tim praktisi dan tim produksi.

2. Mitrasdudi (Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri)

Mitrasdudi yang berada di bawah Direktorat Vokasi, Kemendikbudristek berperan sebagai salah satu unit utama kemendikbudristek yang bertanggung jawab merekomendasikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) yang berada di bawah Mitrasdudi untuk menjadi tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra.

3. Studio Film Animasi

C. Digitalisasi Pemetaan Bahasa

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dan berkolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam digitalisasi pemetaan bahasa. Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga yang mengembangkan dan menyelenggarakan sistem informasi geospasial, termasuk pemetaan dan pemrosesan data geospasial. Dalam kegiatan Digitalisasi Pemetaan Bahasa, BIG berperan memberikan informasi mengenai peta dasar nasional dan penyediaan peta dasar yang diperlukan untuk memvisualisasikan peta bahasa sesuai dengan data geospasial dan batas wilayah administrasi terkini.

D. Pengukuran Daya Hidup Bahasa

Pengukuran daya hidup bahasa dilakukan dengan penghitungan indeks berdasarkan faktor-faktor vitalitas bahasa yang memerlukan bidang ilmu statistika. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra berkolaborasi dengan Politeknik Statistika STIS untuk memperoleh metode penghitungan indeks yang tepat dan akurat. Selain itu, hasil pengukuran daya hidup bahasa dapat ditampilkan melalui visualisasi diagram. Hal ini membantu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dalam memperoleh gambaran tentang kondisi daya hidup bahasa di Indonesia. Selain itu, data tentang kondisi daya hidup menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam pelindungan bahasa.

BAB IV

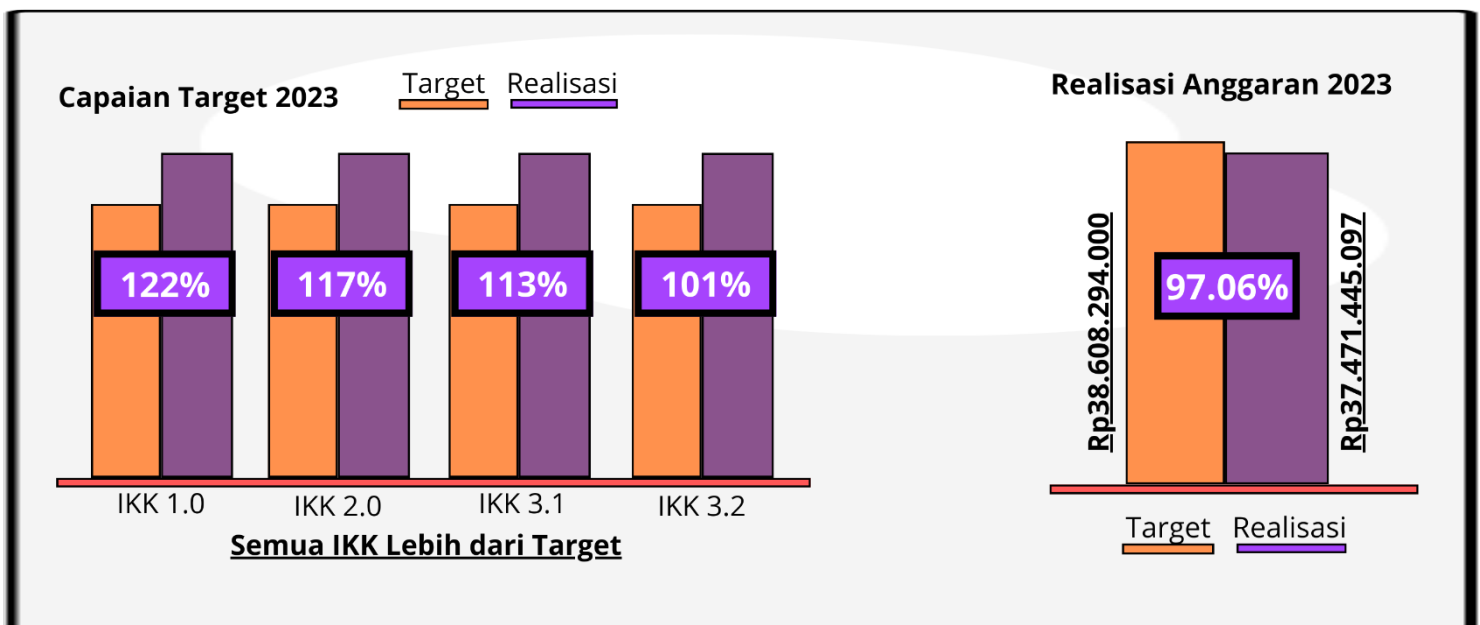
PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan kinerja disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebagai satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2023, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Pengembangan dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditetapkan 3 sasaran kegiatan (SK) dan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK), dengan pencapaian 4 IKK melebihi target,. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Grafik 3.1 Realisasi Anggaran 2023



B. FOKUS PERBAIKAN

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh berbagai faktor. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun 2022 telah berupaya secara maksimal melakukan peningkatan kinerja melalui berbagai macam metode. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh staf pegawai.

Terdapat beberapa perubahan budaya kerja yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat disiplin dan semangat kerja bagi pegawai, yaitu:

- a. Arahan pimpinan untuk melakukan apel pagi setiap awal dan akhir bulan
- b. Penggunaan teknologi *google sheet* untuk pengumpulan data kinerja
- c. Penggunaan *google form* untuk pengumpulan dokumen cuti dan perjalanan dinas

Beberapa hal yang sudah dilakukan di tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari fokus perbaikan yang dituangkan di Laporan Kinerja tahun 2022, antara lain:

1. Melakukan rapat bersama pada awal tahun untuk mereviu kegiatan di tahun sebelumnya dan membahas langkah yang akan dilakukan di tahun berjalan.
2. Melakukan rapat berkala setiap triwulan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan membahas langkah dalam pencapaian target.
3. Melakukan pengajuan peningkatan kompetensi ke Sekretariat Badan Bahasa.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal perlu mendapat perhatian dan beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Memantapkan konsep program dan kegiatan dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, pelaksana kegiatan, dan pakar/narasumber.
2. Mematangkan jadwal pelaksanaan kegiatan disertai dengan rencana penarikan dana.
3. Membangun komunikasi intensif dengan pakar dan narasumber.
4. Mengintensifkan kolaborasi dengan melibatkan unsur-unsur pentahelik(pemerintah, akademisi, badan usaha/industri, masyarakat/komunitas, dan media).
5. Melakukan koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan dengan tim administrasi Tata Usaha.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring progres pelaksanaan program kegiatan dan anggaran secara berkala setiap akhir bulan.
7. Peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai baik teknis maupun administrasi

C. LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu



Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Januari 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	41
2	[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	6
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakan nya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 9.519.915.000
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 29.364.379.000
		TOTAL	Rp. 38.884.294.000

Jakarta,30 Januari 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Budi Utomo

Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 18 Desember 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	41
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah	6
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	91



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 9.243.915.000
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 29.364.379.000
		TOTAL	Rp. 38.608.294.000

Jakarta, 18 Desember 2023

**Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,**



E. Aminudin Aziz

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN
SASTRA
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	41	TW4 : 41	TW4 : 50
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 2.1] Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	6	TW4 : 6	TW4 : 7
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : A
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai	91	TW4 : 91	TW4 : 91.81

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.38.608.294.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 37.471.445.097** atau **97,06%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 1.136.848.903**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

- IKK 1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Progress / Kegiatan :

Produk Pengembangan Sastra: Sudah terlaksana pembuatan 33 Film Animasi (1. Harta Karun Gampong Pande 2. Keajaiban Lubuk Kertang 3. Legenda Boko dan 5 Pulau 4. Mancaka Legenda Batangkinang 5. Dongeng Sungai Jodoh 6. Asal-Usul Batang Merao 7. Cinto di Kemaro 8. Penyus Busuk 9. Ndak Udem 10. Kehormatan dari Condet 11. Sumur Putri 12. Batu Kuwung 13. Situ Bagendit 14. Baroklenting 15. Kembang Bulan 16. Asal-Usul Banyuwangi 17. Legenda Goa Raksasa 18. Tanjung Menangis 19. Kisah Memeua dan Kobubu 20. Kisah Dua Gembala dan Nenek Be Lana 21. Perjalanan Putri Majapahit ke Negeri Ema 22. Asal-Usul Lima Sungai Besar 23. Vova Sanggayu 24. Gunung Mekongga 25. Pusementasi 26. Bulalo Lo Limutu 27. Puang Katoan 28. Goa Kongbeng 29. Pulau Hanyut 30. Selat Saireri 31. Gunung Semaong 32. Legenda Raja Pulau Mintin 33. Legenda Pulau Datu). Sudah terlaksana penyusunan Antologi Penyusunan Sejarah Sastra Indonesia, Pedoman Ensiklopedia Sastra Indonesia, Artikel Ensiklopedi Sastra Indonesia 2023, dan Antologi Cerita Pendek Berbahasa Daerah 2023. Produk Pengembangan Bahasa: Sudah terlaksana pembuatan 4 Kamus Bidang Ilmu (Kamus Bidang Ilmu Pertahanan: Subbidang Keamanan Maritim, Kamus Bidang Ilmu Pertahanan: Subbidang Peperangan Asimetris, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi: Subbidang Jurnalistik, dan Kamus Bidang Ilmu Teknologi Informasi: Subbidang Kecerdasan Artfisial), 4 Kamus Etimologi (Kamus Etimologi Bahasa Belanda, Kamus Etimologi Bahasa Inggris, Kamus Etimologi Bahasa Persia, dan Kamus Etimologi Bahasa Portugis), dan 5 pemutakhiran aplikasi (Korpus, Sipebi, Pasti, PUPI, dan Acuan Kebahasaan).

Kendala / Permasalahan :

Produk Pengembangan Sastra: 1) banyaknya jumlah berkas dokumen swakelola membuat penyusunan dokumen memakan waktu yang cukup lama sehingga berpengaruh kepada proses pembayaran 2) beberapa praktisi dan studio terkendala dalam proses produksi karena permasalahan anggaran, sementara tim tersebut telah menyampaikan laporan progress kegiatan sesuai tenggat Produk Pengembangan Bahasa: 1) Beberapa Kamus Bidang Ilmu dan Kamus Etimologi yang seharusnya penyusunannya sudah selesai di bulan November agak terhambat. Kamus-kamus tersebut adalah: Kamus Bidang Ilmu Teknologi Informasi: Kecerdasan Artfisial, Kamus Bidang Ilmu Komunikasi: Jurnalistik, Kamus Etimologi Bahasa Persia, dan Kamus Etimologi Bahasa Belanda. Rata-rata kendalanya ada pada kesibukan penyusun. 2) Penulisan Bab Morfologi Tata Bahasa Kontemporer juga mengalami kendala dalam penyelesaian penulisan dengan alasan kesibukan beberapa penulis.

Strategi / Tindak Lanjut :

Produk Pengembangan Bahasa: 1) Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan membantu pengumpulan data yang diperlukan untuk



Catatan:
1. UUT/E No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

penyusunan dokumen swakelola dan menjadi mediator kepada tim eksternal untuk menjelaskan progres penyusunan dokumen swakelola dan proses pembayaran 2) mengoordinasikan kepada Tim Tata Usaha untuk dapat dicarikan solusi atas permasalahan tersebut Produk Pengembangan Sastra: 1) Penagihan secara berkala. Strategi ini efektif sehingga penyusunan KBI dan Kamus Etimologi tetap selesai pada bulan November. 2) Selain penagihan secara berkala, tim penulis TBK juga diberikan bantuan sdm untuk merevisi hasil penulisan artikel sehingga penulisan Bab Morfologi selesai di awal bulan Desember.

B . SK 2.0 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

- IKK 2.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah

Progress / Kegiatan :

Model Pelindungan Bahasa dan Sastra : Progres capaian TW IV Model Pelindungan Bahasa dan Sastra telah terpenuhi sebanyak 6 model. Hal ini sesuai dengan target Rencana Aksi Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra T.A. 2023. Sudah terlaksana pembuatan 3 Model Pelindungan Bahasa (Model Registrasi Bahasa dan Sastra, Model Pengukuran Daya Hidup Bahasa, dan Model Digitalisasi Pemetaan Bahasa) dan pembuatan 3 Model Pelindungan Sastra (Model Vitalitas Sastra, Model Pemetaan Sastra, dan Model Konservasi Sastra Lisan). Sudah terlaksana pembuatan Petunjuk Teknis Model Bimbingan Teknis Pengajara Utama Revitalisasi Bahasa Daerah.

Kendala / Permasalahan :

Beban penyusunan di satu waktu yang sama (bulan yang sama) mengakibatkan fokus penyusunan bahan kurang optimal. Selain itu, pengerjaan tugas lain di bulan yang bersamaan.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengatur waktu penyusunan model di setiap output dengan melaksanakan kegiatan terkonsentrasi, seperti konsinyasi, lokakarya. Di samping itu, melibatkan narasumber pada kegiatan tersebut untuk turut memberikan masukan sehingga dapat dilakukan revisinya sekaligus.

C . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

- IKK 3.1 Predikat SAKIP Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Progress / Kegiatan :

Sudah dilakukan evaluasi SAKIP

Kendala / Permasalahan :

Terdapat beberapa dokumen yang perlu diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan hasil rekomendasi penilaian SAKIP

Strategi / Tindak Lanjut :

Melengkapi dan memperbaiki beberapa dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi penilaian SAKIP

D . SK 3.0 Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

- IKK 3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Progress / Kegiatan :

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan seluruhnya

Kendala / Permasalahan :

Sebagian kegiatan baru terealisasi penuh pada akhir tahun sehingga realisasi anggaran dan efisiensi baru terlihat pada akhir tahun anggaran

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi melalui rapat antara tim teknis kegiatan dengan layanan perencanaan dan keuangan untuk membahas pelaksanaan dan evaluasi program dan anggaran secara rutin dalam rangka optimalisasi nilai poin kinerja anggaran, diantaranya memaksimalkan sisa anggaran dalam meningkatkan kualitas capaian output, dan mengawal serta mengelola mekanisme pencairan dana RPD halaman III DIPA

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Meskipun capaian sudah melebihi target, strategi dan tindak lanjut yang berangkat dari permasalahan dan kendala yang dihadapi benar-benar dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 sehingga Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bisa optimal dan maksimal.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Jakarta, 17 Januari 2024

**Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra**



Imam Budi Utomo



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E

PERNYATAAN REVIU LAKIN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah tersajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini. Oleh sebab itu, perlu revisi kecil terhadap Lakin 2023 ini sesuai catatan yang diberikan oleh tim reviu.

Bogor, 23 Januari 2024

Tim Reviu Lakin



Dr. Dora Amalia
NIP 197107292002122001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

Kawasan Indonesia Peace and Security Centre (IPSC)
Jalan Anyar Km 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon (021) 29099245; Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 1442/I2/PR.07.04/2023

**TENTANG
TIM PELAPORAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyatakan bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi, diantaranya, (a) penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; (b) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; (c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan (d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan untuk meningkatkan kualitas rencana, program, dan anggaran agar lebih efektif dan efisien perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSR.

- Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Pembentukan Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra; |
| Kesatu | : | Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terkait dengan Pelaporan berbasis Kelompok Kepakaran Layanan Profesional(KKLP); |
| Kedua | : | Tim Pelaporan bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini serta melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra; |
| Ketiga | : | Tim Pelaporan pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bertugas selama satu tahun anggaran; |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan. |

Ditetapkan di Bogor
 Pada tanggal 6 April 2023
 Kepala Pusat Pengembangan dan
 Pelindungan Bahasa dan Sastra,



Imam Budi Utomo
 NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Koordinator KKLP di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Lampiran 1

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1442/12/PR.07.04/2023

Tanggal : 6 April 2023

Tentang : Tim Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

TIM PELAPORAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA

NO.	NAMA	NIP	AREA LAYANAN
1.	Deni Setiawan	197604052005011001	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2.	Wahyu Dwi Nuryanto	199604152022031000	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3.	Rinda Yosa	199202042019022007	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
4.	Amat Triatna	198212102014041001	KKLP Perkamusan dan Peristilahan
5.	Retno Handayani	198605252009122004	KKLP Pelindungan dan Pemodernan
6.	Radityo Gurit Ardho	198808132019021002	KKLP Pelindungan dan Pemodernan



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

Lampiran 2

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor : 1442/12/PR.07.04/2023

Tanggal : 6 April 2023

Tentang : Tim Program, Anggaran, dan Pelaporan di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

TUGAS TIM PELAPORAN	
Pertama	Mengidentifikasi permasalahan program dan anggaran di lingkungan Pusat
Kedua	Menyampaikan dokumen reviu usulan rencana kerja (renja) Pusat yang dilengkapi dengan kerangka acuan kerja (KAK), rancangan anggaran biaya (RAB), dan data dukung yang diperlukan sebagai bahan penentuan angka dasar t+1
Ketiga	Menindaklanjuti hasil penetapan Pagu Indikatif (PI) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Keempat	Menindaklanjuti hasil penetapan Pagu Anggaran (PA) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Kelima	Menindaklanjuti hasil penetapan Alokasi Anggaran (AA) dengan mereviu untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran t+1
Keenam	Menyusun usul konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan di Pusat
Ketujuh	Mengkoordinasikan usul konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Pusat sebagai petunjuk operasional kegiatan
Kedelapan	Menyusun draf renstra Pusat dan usul revisi program, kegiatan, dan anggaran Pusat (T 0 dan T+1)
Kesembilan	Berkoordinasi dengan petugas teknis Pusat dalam rangka sinkronisasi ketepatan rencana dan anggaran
Kesepuluh	Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Pusat melalui aplikasi SPASIKITA (SIMPROKA), paling lambat tanggal 16 setiap bulan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. https://spasikita.kemdikbud.go.id/
Kesebelas	Melakukan pengisian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Akhir, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Mandiri pada aplikasi SPASIKITA (KINERJA)
Keduabelas	Melakukan pemantauan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA. https://smart.kemenkeu.go.id/
Ketigabelas	Melakukan pemantauan capaian kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas PP 39. https://e-monev.bappenas.go.id/
Keempatbelas	Menyusun laporan triwulan dalam bentuk pengukuran kinerja per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember
Kelimabelas	Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (Lakin) Pusat tepat waktu
Keenambelas	Menyusun dokumen Peta Risiko pada awal tahun dan Mitigasi Risiko triwulanan sebagai kelengkapan Manajemen Risiko Pusat
Ketujuhbelas	Melakukan evaluasi dan reviu Renstra Pusat minimal setahun sekali sebagai bahan untuk melakukan revisi Renstra
Kedelapanbelas	Berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan dan atau pimpinan Pusat terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, idenfikasi kendala dan strategi, RPD, dan pelaksanaan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kesembilanbelas	Berkoordinasi dengan tim keuangan dalam rangka pemanfaatan aplikasi molk untuk pemantauan dan optimalisasi nilai IKPA
Keduapuluh	Berkoordinasi dengan tim layanan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Badan dalam rangka pelaporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran pada Pusat
Keduapuluhsatu	Melaporkan hasil tugas-tugas pelaporan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
Keduapuluhdua	Seluruh laporan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran divalidasi dan ditandatangani oleh Kepala Pusat tepat waktu



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA**

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC)
Jalan Anyar Km. 4, Sukahati, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Telepon (021) 29099245, 29099247; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 0095/I2/PR.06.00/2024**

**TENTANG
TIM EVALUASI MANDIRI LAPORAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN
PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang merupakan unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- : b. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/0/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA, BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

KEDUA : Tim Reviu bertugas

1. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024 berkualitas; dan
2. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2024.

KETIGA : Masa jabatan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 22 Januari 2024
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Imam Budi Utomo
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Bendahara Pengeluaran
4. Yang bersangkutan

Lampiran I
Keputusan Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 0095/12/PR.06.00/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

TENTANG
TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Struktur dalam Tim
1.	Dora Amalia NIP 197107292002122001	Widyabasa Ahli Madya	Pengarah
2.	Azhari Dasman Darnis NIP 197305142001121005	Widyabasa Ahli Madya	Ketua Pelaksana
3.	Lisa Misliani NIP 198007312003122002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota
4.	Dewi Puspita NIP 197605012006042001	Widyabasa Ahli Madya	Anggota
5.	Dwi Agus Erinita NIP 197208201999032002	Widyabasa Ahli Madya	Anggota

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Januari 2024
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Imam Budi Utomo
NIP 19660520199103100